



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI**

- Tahun Sidang : 2019 – 2020  
Masa Persidangan : II  
Rapat ke : -  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Dengan : Menteri Hukum dan HAM RI  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, tanggal : Senin, 24 Februari 2020  
Pukul : 14.32 WIB – 16.47 WIB  
Tempat : RR Komisi III, Gd. Nusantara II lantai 2  
Ketua Rapat : **H. Desmond Junaidi M., SH.,MH.**  
Sekretaris : Novianti, S.E.  
Acara : 1. Rencana Kerja Kemhumham RI Tahun 2020;  
2. Pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan  
Pemasyarakatan;  
3. Tindak lanjut Pembahasan RUU KUHP dan RUU  
Pemasyarakatan;  
4. Lain-lain.  
Hadir : A. Anggota DPR RI :  
36 dari 53 orang Anggota dengan rincian:

**PIMPINAN**

4 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Herman Herry
2. Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum
3. H. Desmond Junaidi M., SH.,MH.
4. H. Ahmad Sahroni, SE

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:**

9 orang dari 11 orang Anggota:

1. M. Nurdin
2. Bambang DH
3. Trimedy Panjaitan
4. Masinton Pasaribu
5. Ichsan Soelistio
6. Wayan Sudirta
7. H. Safaruddin
8. Agustiar Sabran
9. H. Mohammad Idham Samawi

\9. H. Mohammad Idham Samawi

**2.FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:**

4 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. DR. H.M. Aziz Syamsudin, SH., SE., MAF., MH
2. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si.
3. Supriansa, S.H., M.H.
4. Ir. Hj. Sari Yuliaty, MT.

**3.FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**

4 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Habiburokhman, SH., MH
2. H. Rahmat Muhajirin, SH.
3. Muhammad Rahul
4. Bambang Haryadi, SE.

**4.FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:**

2 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Eva Yuliana, M.Si.
2. Ary Egahni Ben Bahat, SH

**5.FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

2 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Luqman Hakim, S.Ag
2. H. Moh. Rano Al Fath, SH., MH.

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. H. Santoso, SH
2. DR. Hinca IP Pandjaitan XIII, SH., MH., ACCS
3. Didik Mukrianto, SH., MH.

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

4 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. Drs. H. Adang Daradjatun
2. Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, SH., MH.

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

3 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. Pangeran Khairul Saleh
2. Sarifuddin Sudding, SH., MH.
3. H. Nazaruddin Dek Gam

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

1. H.Arsul Sani.,SH.,M.Si

**B. UNDANGAN**

Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajaran

**Jalannya Rapat:**

**KETUA RAPAT (H. DESMOND JUNAI DI MAHESA., SH.,MH):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Bapak Ibu Anggota Komisi III DPR RI,  
Pak Menteri Hukum dan HAM dan jajaran.

Kehadiran 27 anggota dari 53 dan 8 Fraksi, berarti sudah memenuhi syarat kuorum. Sebelum saya mulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama masalah rapat, masalah rapat kita mau sampai jam berapa? Sampai jam 4? Jam 4 ya? Bapak Ibu? Atau sementara jam 4? Oke, bisa diperpanjang sampai jam? Enggak ini masalah cara saja, kenapa? Saya maunya ada dinamika, apakah kita per fraksi langsung dijawab atau dikumpulin baru dijawab? Ini masalah teknis. Ini kan anggota banyak ya. Terserah ini sebelum saya buka. Di buka dulu? Kalau di buka dulu boleh.

*Bissmillahirrahmanirrahim.*

Saya buka rapat ini dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIMULAI PUKUL 14.32 WIB)

Oke ada usul Pak Sudding?

**KETUA KOMISI III DPR RI/F-PDIP (HERMAN HERY):**

Usul ketua.

**KETUA RAPAT :**

Siap.

**KETUA KOMISI III DPR RI/F-PDIP (HERMAN HERY):**

Jadi pertama-tama tadi apa yang diinginkan pimpinan rapat soal batas waktu jam berapa saya usulkan kita limit kan jam 5 sore. Kalau sampai jam 5 sore nanti perlu diperpanjang kita akan perpanjangan sampai setelah magrib kita baru memulai lagi sampai jam 8 malam, supaya tidak terlalu terburu-buru dan kepada anggota tidak diberi batasan. Namun supaya rapat yang menjadi komprehensif untuk sesi pertama ini kita per Fraksi saja dulu, per Fraksi tidak dibatasi berapa menit, kemudian Menteri langsung menjawab Fraksi per Fraksi jadi tidak dikumpulkan. Kita lihat perjalanan sampai jam 5 sore nanti. Jika kurang dan ada anggota yang ingin memperdalam dipersilakan. Saya kira itu usul konkret saya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Tolong wartawan yang tidak berkepentingan agak minggir sedikit karena Anggota pada gerah ya, yang di belakang Anggota tolong lebih tertib. Di atas ada ruangan wartawan ya. Ya, masih foto? Oke.

Bapak Ibu Anggota,

Sekali lagi pertanyaan itu sesuai dengan tupoksi Kementerian Hukum dan HAM. Yang bukan berkaitan dengan tupoksi, Pimpinan akan potong. Tolong baca di grup Komisi III tadi sudah saya *share* itu wilayah-wilayah dimana tupoksi Kementerian Hukum dan HAM. Baca ya, kalau ada pertanyaan wilayahnya mana sudah ada *guidence* yang jelas. Untuk itu kami persilakan Pak Menteri untuk memaparkan dari pertanyaan, silakan Pak Menteri.

**MENKUMHAM RI (PROF. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang saya hormati dan banggakan Pimpinan Komisi III,  
Bapak Ibu Anggota Komisi III.

Terima kasih atas kesempatan ini untuk menyampaikan pertanyaan, jawaban dari pertanyaan resmi dari Komisi III dan beberapa catatan tambahan dari kami sebelum kami langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Komisi III.

Bapak Ibu sekalian,

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM diawali tahun 2010 sampai 2011, dan kita menetapkan tata nilai dari Kementerian Hukum dan HAM, dan pada tahun 2015 kita berubah dari tata nilai kirab yaitu kepentingan masyarakat, integritas, responsif, akuntabel, profesional, kita masuk ke PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif). Ayo kerjakan ini PASTI. Itu waktu itu sesuai dengan kabinet kerja pada pemerintahan Jokowi.

Nah dari penilaian tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2017 Kementerian Hukum dan HAM memperoleh skor 71,74 bb indeks reformasi birokrasi 76,33 maturitas SPIP 2,4 berkembang dan opini BPK atas laporan keuangan WTP. Tahun 2018 kita meningkat skor menjadi 74,54 demikian juga indeks reformasi birokrasi 77,33 dan maturitas SPIP tetap 2,4 dan opini BPK atas laporan keuangan WTP. Tahun 2019 semuanya sedang dalam proses evaluasi ya skor dari panel B, juga indeks birokrasinya maturitas 3,39 dan WTP dalam proses audit. Dan dalam hal pembangunan zona integritas Bapak Ibu sekalian, predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2015 hanya ada satu WBK

(Wilayah Bebas Korupsi) meningkat 2018 sepuluh dan tahun 2019 ada 39 yaitu WBKnya 39 dan WBBMnya 4. Ini adalah suatu lompatan yang cukup signifikan dan kami berupaya untuk terus meningkatkan wilayah integritas kami dan tahun ini kita juga terus mengusulkan ini 135 satker untuk kita usulkan masuk wilayah WBK WBBM.

Berikutnya dalam upaya peningkatan sumber daya manusia dan karena sekarang juga pemerintahan Kabinet Indonesia Maju ya, kita meningkatkan sumber daya manusia, kita membentuk *corporate university*. *Corporate university* merupakan pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang tertuang di dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara dimana setiap ASN wajib mendapatkan diklat 20 jam per tahun. Maka itu kita membangun membuat program *corporate university*. Fokus tujuan strategis organisasi pembelajaran yang berfokus untuk kepentingan organisasi. Model pengembangan kompetensi *corporate university* 10% pelatihan *classical* yaitu pembelajaran dilakukan secara terstruktur dan mandiri, 20% pembelajaran pelatihan non klasikal yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kooperatif dalam sebuah komunitas maupun bimbingan, dan 70% pelatihan non klasikal *self development on the job training and taskforce* melalui program belajar mandiri.

Beberapa prestasi yang diperoleh sepanjang 2017 tahun 2019 yaitu terbaik pertama implementasi rekrutmen ASN berbasis teknologi informasi dari seluruh KL kita terbaik pertama. Terbaik pertama *National Procurement Award* pada program pemenuhan standar LPSE. Pengelolaan kepegawaian terbaik kategori besar dalam penghargaan BKN *award*. Peringkat kedua kategori pengelolaan kepegawaian terbaik bagi Kementerian lembaga. Peringkat kedua LPSE *award* pada kategori kepemimpinan dalam transformasi pengadaan secara elektronik dan beberapa penghargaan lainnya antara lain, yang ada top *fourty*, inovasi pelayanan publik atas pencatatan hak cipta *online* dengan teknologi kriptografi. Top *ninety-nine* inovasi pelayanan publik atas inovasi aplikasi indeks kinerja organisasi bantuan hukum dan lain-lain. Ada banyak hal-hal yang kita peroleh.

Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam harmonisasi Perda dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam harmonisasi peraturan-peraturan daerah. Nah untuk itu kami mengeluarkan instruksi Menteri Hukum dan HAM tentang revitalisasi kantor wilayah sebagai *law and human right center*, untuk membangun suatu lembaga dibawah kanwil suatu organisasi yang segera dapat melakukan bantuan kepada pemerintah-pemerintah daerah dalam rangka harmonisasi peraturan-peraturan daerah dan sinkronisasi, dan membantu daerah-daerah dalam penyusunan-penyusunan Perda. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 15 dilakukan di Kalsel, kemudian juga nanti tanggal 27 Februari di Jawa Barat, 26 di Jawa Tengah. Ini sudah mulai kita lakukan.

Bapak Ibu sekalian,

Itu pengantar, sekarang kami masuk ke apa yang dimintakan penjelasan oleh Komisi III.

Bapak Ibu sekalian,

Strategi optimalisasi pendapatan ada beberapa ini masuk di halaman 2 rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM dalam menyelesaikan persoalan pemasyarakatan. Ini masalah klasik yang terus-menerus dan kita sudah melakukan beberapa lompatan dalam penyelesaiannya, walaupun tetap mengalami *over* kapasitas dan revitalisasi pemasyarakatan.

Bapak Ibu sekalian,

Dalam perbandingan pertumbuhan penghuni dengan kapasitas serta data *over crowding* jumlah lapas rutan berjumlah 528 dengan kapasitas 131.654 ya, dan saat ini berjumlah isi lapas rutan 267.000 orang. Kira-kira kenaikan per tahun 20.000 orang nett. Nett dalam artian setelah dipotong remisi, PB dan lain-lain, yang keluar, ada penambahan 20.000 per tahun. Ini suatu jumlah yang sangat besar. Jadi rata-rata pertumbuhan jumlah penghuni 7,5 dibanding satu. Ini yang membuat kondisi Lapas kita menjadi sangat *over* kapasitas.

Data narapidana dan tahanan sepanjang tahun 2019, keluar masuknya kalau ditotal yang masuk dan yang keluar 415.830, nettnya setelah keluar itu 267.000. Nah tahanan 63.024 narapidana 125.000 ini jumlah nett. Penghuni yang masuk 188.354 ya, jumlah penghuni sekarang per Desember 2019 269.864, penghuni yang bebas 142.591 orang. Jadi memang Bapak Ibu sekalian walaupun besar keluar tapi jumlah yang masuk jauh lebih besar.

Oleh karenanya perlu upaya untuk melakukan penanganan *over crowding* dan *over* kapasitas tersebut. Kita mengeluarkan *grand design* penyelesaiannya dalam Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017, antara lain pada penetapan regulasi ada SOP tentang tahanan *overstaying*. Kita mengalami kemajuan dulu *overstaying* itu cukup banyak, sekarang kita nol kan Pak. Jadi kita sudah bekerjasama dengan aparat penegak hukum baik kejaksaan, kepolisian maupun pengadilan, kita berupaya me-nol kan ya. Kita mengeluarkan beberapa peraturan termasuk percepatan pemberian hak integrasi dan remisi melalui revisi Permenkumham dan melalui kemudahan-kemudahan yang dilakukan dalam persyaratan untuk remisi PB tetapi tetap taat pada undang-undang *crash* program. Dengan penambahan kemudian kita mau menambah tenaga pegawai pada tahun 2017 dan 2018 untuk Dirjenpas kita memperoleh tambahan 43.256 orang dan sarana prasarana sejak tahun 2014 sampai tahun 2019 ada pembangunan rehab renov pada 325 UPT dengan jumlah penambahan kapasitas hanya 36.181. Bisa dibayangkan yang masuknya sudah demikian besar, penambahan kapasitas cuma 36 ribu. Itu pun sudah dari

2014 sampai 2019. Kalau kita bayangkan penambahan tiap tahun 20 ribu ini jauh dari, jadi makanya persoalannya tetap tidak mampu kita melakukan tanpa ada sesuatu kebijakan yang betul-betul reformatif mengenai hal ini.

Penguatan kelembagaan juga kita melakukan beberapa langkah penanganan *over* populasi tahun 2019 melakukan *crash* program misalnya ya, November Desember 2019 target kita untuk percepatan 17.464 mencapai 22 ribu *over* target berarti suatu prestasi yang baik. Januari, Maret 20 target kita 11.900 tercapai 12.272 orang. Kemudian mempertahankan Lapas Rutan untuk terus zero *overstaying*, artinya kalau ada penegak hukum yang belum mengeluarkan perpanjangan penahanan baik pengadilan maupun apa, kalau sudah sampai bebas demi hukum kita langsung keluarkan. Kalau dulu marah-marah mereka Pak, sekarang kita sudah ada kesepakatan, karena itu akan kita bayari secara hukum. Sebetulnya kalau mereka di dalam lewat hukum kita bayari itu persoalan juga buat kita karena itu bukan tanggungan kita, itu tidak lagi tanggungan negara. Tapi sekarang sudah kita lakukan per Desember 2019 ya ada 2.738 orang. Kita juga melakukan re-distribusi narapidana dari tempat yang sulit yang padat ke tempat yang longgar ya di 2019 171.000 orang ya. Tahun 2020 6.428, juga kebijakan tentang diversifikasi anak.

Bapak Ibu sekalian,

Peluang dan tantangan jumlah penghuni usia produktif, usia 15 sampai 64 tahun merupakan angkatan kerja usia produktif dan di bawah 18 tahun tergolong anak-anak. *Database* masyarakat mencatat bahwa 80% lebih narapidana berada dalam usia produktif. Ini dapat dilihat dari data yang ada disamping. Nah bagaimana berubah tantangan menjadi peluang? Yang kita lakukan beberapa program pada tahun 2020 dan juga 2019 melakukan pembinaan kemandirian, kita bekerja sama dengan PUPR membuat pelatihan ahli batu, ahli tukang yang bersertifikat. Tahun 2019 kita melatih 1956 sehingga kalau mereka keluar dari Lapas mereka sudah mempunyai sertifikat ahli sebagai tukang kayu, tukang segala macam yang tersertifikasi oleh Kementerian PUPR. Tahun 2020 target kita ada 33 ribu dan anak 2.200.

Rehabilitasi narapidana pengguna narkoba masih jauh dari harapan, hanya 21.540 orang dan itupun kita bekerjasama dengan BNNP dan BNN, membentuk 137 komunitas ekonomi melalui kelompok masyarakat peduli masyarakat sebagai wadah pemberdayaan narapidana. Kemudian ada sekolah mandiri bagi anak di 19 LPK ya (Lembaga Pembinaan Khusus Anak).

Nah pemenuhan sarana prasarana ya Bapak Ibu sekalian menurut PP 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP kondisi saat ini telah terdapat 165 rutan. Seharusnya setiap kabupaten/kota harus ada rutan. Tapi kita kenyataannya ada beberapa di Bali, Denpasar saja tidak ada rutan, menyatu dengan Kerobokan. Jadi memang ini persoalan buat kita sehingga kadang di Rutan di Lapas digabung menjadi rutan dan lapas, ini bahkan ada rutan menjadi lapas. Artinya ada orang yang warga binaan

yang sudah inkrah kita masukan di dalam karena keterbatasan sarana kita. Dan kita melakukan implementasi *open camp* yang sarana simulasi yang sekarang di Lapas terbuka Ciangir. Dan peningkatan kualitas SDM melalui *corporate university* seperti yang saya sampaikan, melakukan terobosan-terobosan, rehabilitasi medis dan lain-lain, dan tentunya penguatan kelembagaan kita melakukannya.

Bapak Ibu sekalian,

Strategi optimalisasi pendapatan negara dan penerimaan negara, penerimaan PBB maupun pembangunan budaya sadar hukum dan legislasi. Target dan realisasi PNBPN atau Direktorat Jendral AHU kita melalui *over target*, mencapai target lebih 118% di tahun 2019. Target APBN tahun 2019 887 miliar, realisasi 1 triliun lebih. Jadi kita memperoleh *over target* di realisasi PNBPN, detailnya ada di materi yang kami sampaikan.

Kemudian strategi dalam optimalisasi pendapatan penerimaan negara di bidang layanan hukum Bapak Ibu sekalian, peningkatan kualitas dan pelayanan hukum berbasis teknologi informasi melalui penyempurnaan beberapa aplikasi kita dalam bidang kewarganegaraan *database advokat* asing, ini aplikasi kenotariatan, aplikasi legalisasi elektronik, pengembangan aplikasi kurator, integrasi NIK dengan dukcapil untuk semua layanan *online* AHU, dan pembangunan fasilitas *center* untuk menekan *downtime* layanan *online*. Ini semua kita lakukan sehingga mempercepat pelayanan publik kita.

Strategi optimalisasi pendapatan, peningkatan PNBPN juga optimalisasi peran Kanwil dalam perolehan PNBPN melalui penguatan fungsi layanan *helpdesk*, penguatan fungsi penyebaran informasi, koordinasi, dan penguatan fungsi-fungsi advokasi. Di Direktorat Jendral kekayaan intelektual juga terdapat peningkatan PNBPN yang cukup signifikan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat tahun 2015 ya realisasi PNBPN kita itu hanya 300 miliar. Di 2016 kalau pendapatannya 2016 167 miliar, 2017 naik lagi 131 miliar. Di 2018 ya eh sorry di, ini persennya, di 2016 552 miliar ya, di 2015 350 miliar, 2016 melompat ke 552 miliar, 2017 melompat lagi ke turun sedikit ke 460 miliar, kemudian di 2018 498 miliar, di 2019 melompat 142% 714,6 miliar, suatu jumlah yang cukup signifikan. Karena apa? Kita sudah melakukan sistem *online* pendaftaran merek, hak cipta dan lain-lain, dan lain-lain.

Dengan penggunaan teknologi informasi kita akhirnya bisa meningkatkan pendapatan, pendapatan PNBPN kita. Dan penyelesaian-penyelesaian permohonan ya terjadi peningkatan secara signifikan. Jadi kalau kita lihat target penyelesaiannya di tahun 2019 ada peningkatan 125,84%. Menyelesaikan yang masuk dan kemudian menyelesaikan tunggakan, jadi 203.219 permohonan. Dan dalam pendapatan dan penerimaan di bidang kekayaan intelektual 4 area perubahan yang kita lakukan penataan SDM, pembangunan infrastruktur, mendukung kinerja layanan, optimalisasi TI (teknologi industri atau teknologi informasi) yaitu



peningkatan pelayanan publik industri 4.0 dan kemudian harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk penyempurnaan proses bisnisnya. Ini kita lakukan dan kita mendorong IT akademi sebagai upaya penyebaran informasi dan peningkatan kapasitas. Kami berharap bahwa kita sudah bekerja sama dengan berbagai negara baik di kantor intelektual properti di Singapura, di Jepang dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas kerja sama dan peningkatan intelektual properti kita.

Kemudian kita masuk ke sadar hukum *slide* 18 Bapak Ibu sekalian. Nah dalam rangka mengembangkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat, kita didukung oleh penyuluh hukum sebanyak 774 orang yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Dari penerimaan bantuan hukum Bapak Ibu sekalian, terdapat peningkatan yang cukup baik dan ini tergantung kepada kemampuan anggaran kita. Kalau tahun 2016 kasus yang kita berikan bantuan hukum litigasinya 7.755 orang, non litigasi 2.348. Tahun 2017 meningkat 8.586 kasus atau orang non litigasinya 2.000. Tahun 2018 meningkat ke sepuluh ribuan, non litigasi juga meningkat, dan tahun 2019 meningkat lagi 11 ribu kasus dan non litigasi 3.849 kegiatan. Ini yang kita lakukan.

Dalam rangka mendukung percepatan kebutuhan legislasi kita mendorong rencana undang-undang dalam percepatan pembangunan ekonomi, sumber daya manusia dan penegakan hukum yang adil dan berkepastian hukum. Beberapa rencana undang-undang yang kita dorong yaitu rencana Undang-Undang tentang KUHP yang baru kita bicarakan, rencana Undang-Undang tentang Pemasarakatan, rencana Undang-Undang tentang Bea Materai, rencana Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja yang berupa Omnibuslaw, rencana Undang-Undang tentang Ketentuan Fasilitas Perpajakan juga Omnibuslaw. Ini juga kami mohon dukungan rencana tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika. Ini sangat penting agar kita bisa menyelesaikan kasus-kasus narkotika yang parah ini, dan seterusnya yang dapat dilihat termasuk rencana Undang-Undang tentang Ibukota Negara, ada tiga belas.

Berikutnya tentang keimigrasian Bapak Ibu sekalian. Efektivitas pengawasan orang asing dan kebijakan Presiden tentang bebas visa. Bapak Ibu sekalian, terjadi peningkatan-peningkatan kegiatan, saat ini ada Tim Pora Kecamatan sebanyak 3.684 Tim Pora. Data operasi gabungan tahun 2018 118 kegiatan, 2019 288 kegiatan. Ada beberapa pelanggaran keimigrasian tahun 2015 ada 12.594 tindakan administratif keimigrasian, 2019 meningkat menjadi 15.273 tindakan keimigrasian. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian ya perbandingan-perbandingannya, dan efektivitas pengawasan dilakukan oleh Tim Pora dan juga termasuk Direktur Jenderal Imigrasi ya. Terjadi penurunan presentasi pelanggaran keimigrasian dari 2018 ke 2019. Ini akibat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Keimigrasian maupun gabungan dengan Tim Pora.

Bapak Ibu sekalian,

Tentang evaluasi bebas visa kunjungan, rasio kedatangan pemegang bebas visa kunjungan dengan pelanggaran tindak keimigrasian dilakukan pada tahun 2018 yang masuk BVK yang menggunakan BVK itu 10.437.586, pelanggar keimigrasian hanya 872 orang dari 10 juta. Jadi dari 11.970 kedatangan satu kasus, jumlah yang tidak terlalu besar. Tahun 2019 agak terjadi peningkatan ya ada 9 juta yang menggunakan bebas visa kunjungan dan pelanggaran keimigrasian 1.339 orang. Berarti tiap 7.231 kedatangan ada 1 kasus rata-rata per kasus. Jadi ini rasio dari yang kita yang kita projustifikasi di tahun 2018 delapan kasus, jadi ada 10 juta kasus kedatangan BVK, 8 kasus di proju. Tahun 2019 90,6 juta kasus kedatangan 53 kasus, jadi 182.681 per kedatangan kasus. Ini mengenai pelanggaran-pelanggaran keimigrasian.

Data perlintasan *slide* ke-25, lima negara terbesar subjek bebas visa kunjungan adalah China 5.514.391 data perlintasan yang menggunakan BVK, diikuti dengan Singapura 4,4 juta, diikuti dengan Australia 3,6 juta. Kemudian Malaysia 3,7 juta dan India 1,4 juta. Jadi ini yang terbesar China, Singapura, Australia, Malaysia yang ketiga, Australia yang keempat dan India yang kelima. Ini yang keimigrasian nanti beberapa pertanyaan berikutnya kami persilahkan kepada pembahasan RUU ada dua yang Bapak Ibu telah mengikutinya bersama-sama karena pembahasan Rencana Undang-Undang KUH Pidana dan pembahasan Rencana Undang-Undang Pemasyarakatan yang telah dimasukkan dalam Prolegnas 2020 prioritas, Prolegnas prioritas 2020 untuk di *carry over* yang juga merupakan domain dari Komisi III adalah rencana Undang-Undang KUHP dan rencana Undang-Undang Pemasyarakatan.

Perkembangannya kita sama-sama mengetahui Bapak Ibu sekalian, kami tidak perlu laporkan ya, perkembangan rencana Undang-Undang Kemasyarakatan dan nanti bagaimana ini seterusnya. Setelah Supres kita bisa memutuskan tahapannya, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 kita bisa meng-*carry over* rencana undang-undang tersebut.

*Slide* 30, rencana kerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 adalah sasaran strategis kita adalah satu terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum. Kedua meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat semuanya termasuk Dirjen AHU, Dirjen Pemasyarakatan semuanya di sini juga termasuk yang lain-lain, KI, imigrasi dan lain-lain. Terselenggaranya penegakan hukum dibidang keimigrasian pemasyarakatan dan kekayaan intelektual yang menjamin kepastian hukum masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi, KI, Dirjen pemasyarakatan, dan juga kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan, pemenuhan HAM, Dirjen HAM dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi dari yang menjadi *vocal point*nya adalah Sekjen, Irjen dan BPSDM.

Tahun 2020 pagu alokasi anggaran Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp.13.846.000.000.000 dengan komposisi biaya operasional

8,30% 1,1 triliun, rupiah murninya 1, 7 triliun ya sekitar 12,38% ya. Kemudian BAMA, Bamanya cukup gede Pak 1,89 hampir 1,9 Triliun. Jadi konsekuensi dari kita mempunyai narapidana 267.000 konsekuensi BAMAnya dengan pagunya 20.000 rupiah. Itupun sudah meningkat dulunya 15.000, 17.000 Pak, 1,9. Nah seperti kita ketahui bersama hampir setengah dari pada jumlah penghuni Rutan dan Lapas adalah apa namanya kasus-kasus yang berkaitan dengan narkoba maka tadi saya meminta tadi Undang-Undang Narkoba harus kita *reform* dan juga satu kebijakan kita tentang penyelesaian kasus-kasus narkoba. PNBPN 2,1 triliun, belanja pegawai 6, 9 triliun.

Jadi dari semua total anggaran rupiah murninya 11,62 PNBPN 2,1 triliun. Pagu alokasi anggarannya tertera pada *slide* berikutnya Bapak Ibu sekalian di data masing-masing Bapak Ibu ada, enggak perlu kami bicarakan untuk menghemat waktu dapat dilihat disana nanti kalau ada yang mau bertanya ya, termasuk mengenai kenaikan anggaran dan yang bersumber dari rupiah murni sekitar 240 miliar dan bagaimana komposisinya ada di sini. Nah prioritas nasional ada 77 miliar yang terdiri dari di Dirjenpas (4,6), Dirjen PP (4,4), BPSDM (5,9), BPHM (5,9), Balitbang (2,6), dan Inspektorat Jendral (1,9).

Dan saya kira ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Kami kembalikan kepada pimpinan.

**WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F-PG (DR. Ir. ADIES KADIR):**

Baik terima kasih Pak Menteri, sebelum kami lemparkan kepada fraksi-fraksi seperti disepakati tadi kami menawarkan dulu kepada pimpinan untuk menyampaikan apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan sebelum kita melakukan pendalaman. Pak Roni ada yang ingin disampaikan? Silakan.

**WAKIL KETUA DPR RI/F-P.NASDEM (H. AHMAD SAHRONI, SE):**

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pak Menteri dan jajarannya dan Para Anggota DPR yang lain.

Saya tidak bertanya tapi saya mau *nyamperin* Pak Yasonna, saya kangen sama Pak Yasonna. Terima kasih.

**WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F-PG (DR. Ir. ADIES KADIR):**

Anak Priok ya?

**WAKIL KETUA DPR RI/F-P.NASDEM (H. AHMAD SAHRONI, SE):**

Aman anak Priok aman.

**WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F-PG (DR. Ir. ADIES KADIR):**

Pak Roni foto dulu sebentar, foto, foto. Ya itu mantap itu Pak Marinus, Pak Marinus. Ya anak Priuk aman dan damai.

**WAKIL KETUA DPR RI/F-P.NASDEM (H. AHMAD SAHRONI, SE):**

Ini bukan tupoksi lagi ini ya?

**WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F-PG (DR. Ir. ADIES KADIR):**

Sudah Pak Roni?

**WAKIL KETUA DPR RI/F-P.NASDEM (H. AHMAD SAHRONI, SE):**

Sudah.

**WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F-PG (DR. Ir. ADIES KADIR):**

Itu saja? Saya ini bingung juga ini tumben-tumben ini Pak Roni kok mau salaman saja mesti khusus-khusus ini, ada apa gerakan kita kan bingung juga kita. Kami kembalikan ke meja pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Adhies untuk menghormati MD3, silakan ketua DPR. Anda hormati peraturan yang ada di Parlemen Pak. Tolong hormati peraturan yang kita buat Pak, kecuali di sini penuh ya. Kali ini ada kosong, tolong hormati peraturan yang kita buat. Karena Pak Aziz yang buat Pak kita suruh duduk dia. Oke, selanjutnya Pak Adhies ada hal yang disampaikan silakan.

**WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F-PG (DR. Ir. ADIES KADIR):**

Terima kasih pimpinan. Atas izin Ketua Wakil Ketua DPR RI Bidang Polhukam Pak Aziz Syamsuddin dan rekan-rekan sekalian.

Pak Menteri saya ada membaca surat dari Menteri Hukum dan HAM tentang usulan pembentukan wilayah khusus di Pulau Nusakambangan. Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, kita tahu bahwa *over capacity* Lapas ini selalu menjadi masalah klasik dari tahun ke tahun periode saya 5 tahun kemarin bahkan sebelum periode saya Pak Menteri sudah berapa periode juga, itu selalu menjadi masalah. Walaupun terus terang memang biar Pak Yasonna ini kita terlepas harus juga memberikan apresiasi bahwa keinginan untuk memperbaiki sistem Lapas di negara kita itu ada. Cuma masih agak terkesan lambat Pak. Saya tidak tahu masalahnya apa, inilah yang ingin kami pertanyakan. Kita tahu bahwa Pak Menteri pernah menyampaikan kalau RUU Lapas itu selesai dalam 40 sampai 50% *over capacity* bisa teratasi. Nah kami juga menunggu ini RUU Lapas ini, mestinya kan kita bisa segera langsung membahas saja karena

*carry over* ini Pak. Apalagi masalahnya yang ditunggu-tunggu ini, kami sudah siap Pak untuk membahasnya, lebih dari siap. Jadi kalau memang ada kesempatan pertama kita bahas saja ini Pak karena memang hal ini kalau bisa lebih memperbaiki Lapas mengurangi *over capacity* seharusnya kita sudah membahas terlebih dahulu.

Demikian juga usulan Bapak ini untuk membentuk wilayah khusus di Pulau Nusakambangan. Nusakambangan kurang lebih 27.000 hektar banyak sekali *resources* di dalamnya kami Komisi III sudah datang melihat langsung tanggal 20. Cuma yang kami sayangkan kenapa 20 Februari kami tayangkan suratnya baru tanggal 20 Februari juga, mestinya kan dari dulu-dulu Pak Menteri, periode Pak Menteri yang lalu. Supaya apa? Supaya bisa lebih dahulu kita berdayakan Pulau ini yang dulu katanya pulau penjara namanya. Kami melihat di sana kawan-kawan yang ikut kunjungan ke sana memang Pulau ini akan membuat tobat Pak ini para pelaku-pelaku kejahatan kalau datang ke sana. Apa lagi yang namanya super *high* maksimum *security* itu, yang memang waktu ditayangkan di luar biasa kalau kita lihat memang belum 100% tapi sudah 90% Pak. Kalau tadi Pak Dewan 10% masuk dimana begitu tapi itu sudah sangat luar biasa Pak, kita bandingkan di Sydney Pak Aziz waktu kita ke sana sudah lebih bagus sedikit Pak Aziz. Dan tempatnya sangat luar biasa, lebih bagus dari Sydney yang kita lihat Pak. Iya Sydney itu Pak Suding kan itu juga waktu itu sama-sama kita keluar malam-malam. Lihat gedung Opera.

Jadi itulah memang yang harus mestinya sudah jauh-jauh hari diusulkan Pak. Jadi kita bentuk wilayah khusus ini khusus tempatnya Lapas di sana itu. Tidak ada lagi di daerah-daerah lain, daerah lain itu kalau sudah berkurang rutan-rutannya lapas di sana berikut *resources*nya kalau gitu kita buat mulai dari bahan mentah di sana dikelola sampai dengan pabriknya bahan jadi. Jangan ditaruh di sana Pabrik Holcim. Pabrik dari orang mana itu Jepang atau Korea itu. Temannya Pak Aziz itu, pabrik semen. Jangan ditaruh di sana pabrik semen itu Pak nanti namanya bukan pulau penjara lagi. Orangnya boleh pergi pabriknya bisa dimanfaatkan nanti pengelolaan bahan. Nah nanti yang akan kita tanyakan apakah ada kerjasama dengan pihak Kumham, apa keuntungannya ada pabrik itu di sana? Kalau enggak ada keuntungannya apa juga dia disana? Iya kan? Nah ini tupoksi kita Pak dalam pengawasan Pak, untuk apa itu pulau penjara itu kok ada Holcim di sana itu, enggak penting itu Pak. Kalau ada apa-apanya kan harus jelas dulu.

Termasuk juga di sana itu orang penduduk di sekitar sama pulau-pulau itu dari hasil kunjungan kami sudah mulai bisa masuk ke pulau tersebut Pak karena ada sedimen di sana. Jadi lama-lama sudah membentuk daratan dan mereka sudah bisa masuk di sana. Jadi kesakralan penjaranya sudah tidak ada lagi di sana Pak itu. Nah hal-hal ini perlu segera dievaluasi Pak, kalau perlu keruk itu biar enggak bisa jalan masuknya orang-orang di sekitar situ itu. Kan bahaya kalau bisa orang masuk di situ itu, lama-lama orangnya nanti yang kayak minimum itu kan sudah bisa berkeliaran di sana, tidak ada batas penjara lagi. Ini takutnya nanti mereka ini bisa jalan bebas ke sana dia keluar lagi nanti dari situ.

Nah hal-hal ini Pak jadi intinya Komisi III akan mendukung kalau Pulau nusakambangan ini betul-betul dimaksimalkan sebagai wilayah khusus untuk Lembaga Pemasyarakatan, jadi betul-betul pulau penjara yang terpisah dari pulau yang lainnya dan kita upayakan agar penjara-penjara itu bisa membuat orang betul-betul *taubatannasuha* di sana Pak. *Taubatannasuha* katanya Pak Sudding.

Itu beberapa, kemudian yang kedua terkait rubasan. Rubasan ini kita tahu bahwa *maintenancenya* besar, khususnya barang-barang yang dititipkan di sana. Semakin lama, semakin lama pasti harganya akan menyusut, yang rugi nanti pemerintah. Coba dicarikan solusinya mungkin lelangnya bisa dipercepat atau di apa selain tidak menumpuk di sana, juga mengurangi biaya *cost* yang dikeluarkan akibat *maintenance* barang-barang sitaan tersebut, kalau perlu dilelang Pak siapa tahu ini kan kawan-kawan banyak barang bagus kalau lelang-lelang itu kan halal. Asal ada anggarannya.

Itu saja Pak Menteri, pimpinan dua hal yang mohon jadi perhatian dan kami mohon jawaban dari meja pimpinan. terima kasih.

*Wallahul Muwaffiqila Aqwamit Tharieq  
WassalamualaikumWarahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Adhies, silakan Pak Menteri Hukum dan HAM langsung dijawab Pak.

**MENKUMHAM RI (PROF. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D):**

Baik, terima kasih Pak Ketua, Adhies. Benar bahwa kita menargetkan pembentukan wilayah kawasan khusus MK. Jadi sekarang dengan Lapas Karanganyar yang baru yang Lapas super Maksimum *security* itu jadi 8 UPT di sana Pak memang buat pertama kalinya sebuah Lapas dengan teknologi IT yang canggih, ya ada Lapas Nusakambangan Lapas Karanganyar teknologinya cukup, kontrol *full* CCTV, kemudian pintu *fully control* secara elektronik dan protapnya benar-benar protap maksimum super maksimum *security*.

**WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F-PG (DR. Ir. ADIES KADIR):**

Cuma yang maksimum banyak yang mati juga Pak, CCTV nya.

**MENKUMHAM RI (PROF. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D):**

Iya itu betul. Jadi disitu juga kita buat tempat yang ada bertahap Pak, jadi kalau dari super maksimum ke maksimum ke medium ke minimum. Jadi kalau dia bertobat dengan *assessmentnya* turun dipindah ke tempat yang lebih ringan pindah dan seterusnya.

Kami sepakat Pak dan kami sudah ajukan ke Menpan ya suratnya sudah, sudah lama ini kita pikirkan kami berpikir setelah selesai Karanganyar baru kita usulkan supaya UPTnya lebih agak cukup lumayan untuk menjadi satu kawasan khusus. Nanti kalau ada pengembangan-pengembangan dan kita punya dana akan membangun lagi di sana lapas-lapas yang mungkin tingkat medium atau hanya *security* apa atau minimum atau juga mungkin maksimum tidak super maksimum. Yang maksimum ada pasir putih dan batu ya batu, lepas batu.

Holcim ini terakhir akan habis tahun 2031 diperpanjang tahun 2001 ya? Jadi 2001 diperpanjang Pak? Bukan jaman kita jadi tapi karena itu investasi tentu kita tidak semudah itu bisa, nanti kita bisa digugat di ICSID. Tapi kita akan apa hasil yang diperoleh, iya CSR apa, ganti rugi bentuk barang 10 M kemudian CSR 2 M, 12 M ini yang apa yang beli Holcim.

Betul apa yang dikatakan oleh Pak ketua memang di situ sekarang sudah mulai masuk penduduk belakangan ini Ibu Dirjen mengatakan penduduk yang sudah bertani di situ terutama yang bersawah terutama akan kita manfaatkan dan bertani di sana dan dengan sistem bagi hasil. Tetapi yang paling berat itu adalah penduduk di kayu laut yang sudah hampir berapa desa itu, hampir satu kecamatan Pak. Hasil sedimentasi ratusan tahun itu. Nah kami sudah mengirim surat ke Menteri PU untuk membuat, *mengurug*, *mengkerok* sedimentasi yang ada sehingga orang tidak bisa *nyebrang* ke ini.

Mengapa kita juga kami membangun Lapas Karanganyar di Nusakambangan supaya itu pas di ujung sehingga membatasi orang masuk Pak. Ini yang kita lakukan, kami juga nanti mau meminta kerjasama dengan TNI untuk membuat pos-pos TNI di sana. Di MK juga ada pusat pembaretan Koppasus yang kadang-kadang mereka pakai Pak disitu.

Jadi kami sependapat NK dapat kita maksimalkan dapat kita membuat sebagai Pulau khusus untuk Lembaga Pemasyarakatan. Jadi sekarang Lapan kalau kita nanti punya uang untuk sekelas, oke dibawah kelasnya Karanganyar ya tergantung dana dari pemerintah. Mengapa kita tidak mampu, tadi dikatakan seharusnya ini bisa lebih cepat kita lakukan, memang kemampuan dana kita untuk dana tahun 2020 hanya untuk Lapas Direktorat Jenderal Pas 5 triliun, belanja pegawai saja sudah hampir dua lebih, BAMAS sudah 1,8 hanya urusan makan Pak sudah 1,8 dari 5 Triliun. Coba kalau kita dapat 1 Triliun saja untuk biaya buat Lapas baru kita sudah betul-betul sangat mewah Pak. Jadi ini yang penyebabnya.

Rubasan memang *maintenancenya* sebetulnya tidak terlalu besar. Kami sudah membuat MoU dengan penegak hukum, setuju Pak. Ini kan bagaimana melelang secepatnya, ini tergantung jaksa dan kalau memang di ambil protap jaksa dan Kementerian Keuangan kalau sudah inkrah, kalau inkrah. Nah seharusnya kalau boleh, kalau boleh sebaik masuk di lelang masukkan uangnya kalau suatu saat memang yang bersangkutan di dikatakan bebas kembalikan uangnya dan kalau misalnya ada harus dieksekusi dan harganya melebihi dari jumlah yang dilelang dikembalikan

kepada yang bersangkutan. Karena harga terus menurun Pak, ada yang busuk kayu-kayu yang disitu ada kayu, mobil-mobil yang jadi semua barang rongsokan dan negara menjadi dirugikan tidak dapat untung. Nah ini yang perlu segera diselesaikan karena kami kalau lelang sendiri nanti ditangkap ini Pak, jadi penegak hukum yang harus melakukan untuk kerjasamanya, aturannya harus diatur dengan baik ya, harus di atur dengan baik. Iya, jadi di sini boleh menurut Pasal 45 KUHAP bisa tetapi ya sering terjadi disharmoni ya. Nanti saya minta Komisi III supaya meminta APH menggunakan Pasal 45 KUHAP.

Baik saya kira sudah saya jawab ketua, *next please*. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Oke, sekarang masuk pada fraksi sesuai dengan kesepakatan tadi waktu tidak *dibatasi* tapi wilayah tupoksi Kementerianlah yang membatasi pertanyaan itu. Kita mulai dari atas, tengah dan bawah ya. Untuk itu atas siapa yang mewakili PDI Perjuangan kami persilakan.

**F-PDIP (Drs. M. NURDIN, MM):**

Kami serahkan kepada Pak Safarudin Pak.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Safarudin.

**F-PDIP (Drs. SAFARUDDIN, SH):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*  
Selamat sore salam sejahtera bagi kita sekalian.

Yang terhormat Pimpinan Komisi III,  
Bapak-bapak, Ibu-ibu Anggota Komisi III,  
Bapak Menteri Hukum dan HAM,  
Beserta seluruh jajaran yang saya cintai dan saya banggakan.

Tadi Bapak sampaikan bahwa lembaga pemasyarakatan itu ada kelompok-kelompoknya yaitu super maksimum *security* kemudian maksimum dan medium. Kalau kita lihat ini pengelompokan ini saya kira cukup bagus, cuma kalau saya lihat apakah pembinaan terhadap kelas-kelas ini sama atau tidak? Harusnya berbeda, harusnya berbeda karena klasifikasinya juga berbeda.

Yang kedua tadi kalau memang orang itu sudah dilakukan pembinaan ada kemajuan didalam kesadarannya maka akan dipindahkan kepada dari super maksimum ke maksimum. Yang saya tanyakan ada enggak Pak ini yang sudah dipindahkan? Dan kalau sudah ada berapa banyak yang bisa pindah dari kelas yang super maksimum ke maksimum dan seterusnya? Ada enggak dan kalaupun ada kriterianya tadi kan di



*assessment*, tapi saya pikir tidak cukup dengan *assessment* itu Pak harus dengan pengamatan. Salah satu *assessment* tapi saya kira pengamatan perilaku sehari-hari juga harus menjadi tolak ukur didalam pengalihan ini.

Yang berikutnya masalah di Lembaga Pemasyarakatan saya pikir kita harus sepeham, harus kita samakan pendapat tentang masalah Lembaga Pemasyarakatan Pak. Ini bukan penjara, Lembaga Pemasyarakatan adalah bukan menghukum orang tetapi memasyarakatkan orang di dalam lembaga pemasyarakatan itu dilakukan pembinaan karena mereka adalah manusia punya hak asasi manusia juga. Jadi kita tidak boleh dari lembaga pemasyarakatan tidak boleh kayak ada rasa dendam, menakut-nakuti orang. Ini ada hak asasi manusia di sini. Jadi kalau umpamanya ada suatu tempat yang tidak boleh orang kunjungi segala macam, saya kira ini tidak boleh Pak. Ini, ini yang saya kira.

Kemudian juga beberapa waktu yang lalu itu ada beberapa LP yang masih kurang fasilitas-fasilitas Pak fasilitas LP-nya, termasuk masalah tempat ibadah, kemudian masalah kebutuhan biologis, kebutuhan biologis terhadap para narapidana ini. Saya kira harus menjadi perhatian kita semua bahwa orang di penjara itu bukan dihukum, tapi ada hak-haknya juga termasuk kebutuhan biologisnya dia. Jadi harus disiapkan tempat mereka untuk menjalankan kebutuhan-kebutuhan itu. Nah yang saya tanyakan berapa banyak LP di Indonesia ini yang sudah punya tempat untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan biologis itu Pak? Dan mekanisme seperti apa? Jangan sampai kebutuhan biologisnya itu juga diberikan tempat, tahu-tahunya bukan keluarganya malah orang lain yang masuk begitu Pak. Ini saya kira harus pengawasan.

Kemudian yang berikutnya adalah tentang masalah Pak Dirjen AHU pernah mengatakan bahwa di korporasi ini erat kaitannya dengan penggelapan pajak TPPU dan korupsi bahkan pidana pembiayaan terorisme ada perusahaan atau yayasan yang menghimpun dana untuk membiayai terorisme. Karena tidak ada yang mengontrol ini. Bagaimana dari Menkumham ini mengontrol ini pernyataan dari Dirjen AHU ini bagaimana mengontrol kalau memang tidak punya wewenang di situ bagaimana kerjasama dengan yang lain-lainnya.

Yang berikutnya masalah pengembangan IT yang telah disampaikan tadi bahwa meminta penjelasan Menteri terhadap upaya untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada publik secara mudah, cepat dan berbasis IT, yang juga dihadapkan dengan prinsip-prinsip transparansi, profesional dan akuntabel. Itu Pak.

Kemudian masalah kerusuhan, baru saja terjadi kerusuhan di Sumatera Utara Pak. Katanya sih masalah narkoba, mau razia dengan narkoba. Ini Pak sudah saya enggak tahu, enggak menghitung, ini sudah kesekian kalinya. Jadi kalau, iya kasus yang sama masalah narkoba. Mau razia terhadap napi melawan, kenapa enggak minta nanti setelah ribut baru minta bantuan kepada polisi. Ini saya kira kalau kita bicara masalah *over* kapasitas, enggak selesai Pak. Mungkin ada langkah-langkah

strategis, mungkin ada langkah yang *out of the box* Pak. Karena kalau Bapak mau membangun LP, anggarannya enggak ada, narapidana kita masuk terus. Di Polres Pak, di Polda itu 80% itu pasti narkoba Pak, dan ujungnya nanti masuk ke LP. Nah ini kita harus carikan jalan keluar Pak. Kita selalu di Komisi III tanya, ada tanya ada jawab. Bapak jawab lagi nanti kekurangan dana tapi apa solusi yang sebenarnya, akar masalah. Ada yang bilang begini Pak, pelanduk itu tidak pernah jatuh dua kali Pak, tapi kalau kita selalu terulang-ulang ya mungkin kita kira-kira begitu Pak.

Akar masalah LP ini apa Pak, apakah memang, karena peredaran ini juga kepala BNN Narkotika Pak mengatakan 80% peredaran narkoba di Indonesia dikendalikan dari LP. Jadi bandarnya ada di LP Pak. Kenapa kita selalu membiarkan itu? Apakah memang *handphone* tidak boleh sama sekali hidup di LP itu atau bagaimana caranya? Supaya karena mereka mengendalikan melalui *handphone* Pak. Di *jam* saja semua di situ Pak, atau bagaimana? Entah bagaimana lah, ya untuk apa kita di sini kita semua enggak bisa berpikir tentang itu, kalau kita enggak bisa memikirkan itu solusinya Pak. Ya kan kita orang hebat-hebat semua, kalau enggak hebat Bapak enggak duduk di Dirjen-dirjen di Kumham. Kita juga kalau enggak hebat enggak jadi Komisi III kita Pak. Iya kan? Orang hebat semua Pak kita ini. Tapi masalah kita hadapi setiap saat terjadi dan kita selalu dipermalukan di tengah-tengah masyarakat Pak. Kita coba carikan solusi masalah ini LP, Dirjennya ganti, ya sama saja, Kepala LP nya ganti, ya sama saja. Berulang-berulang begitu Pak. Nah ini harus kita akar masalahnya dimana sebenarnya.

Kemudian Pak masalah pemantauan terhadap orang asing Pak. Ada penurunan, ada peningkatan Pak disitu saya lihat tadi yang Bapak sampaikan halaman 21 yaitu 2018 itu 12.594 sedangkan 2019 itu 15.273 Pak. Sejauh mana pemantauan terhadap pengawasan orang asing Pak? Saya lihat Dirjen Imigrasi itu anggotanya di tingkat provinsi Cuma berapa orang Pak, di kabupaten ada Pak ya? Ada? Banyak berkeliaran orang-orang asing yang sebetulnya visanya bukan visa untuk kerja tapi bekerja Pak. Sejauh mana Bapak memantau ini? Sejauh mana langkah-langkah Bapak memantau ini karena di kecamatan-kecamatan di desa-desa Bapak tidak punya orang yang bisa memantau apa orang asing di sana. Termasuk Pak, Bapak coba masuk ke daerah kota sana, yang *mijit-mijit* itu Pak, yang *mijit-mijit* di tempat pijit itu, enggak informasi dari Ketua, informasi ini dari Ketua Komisi, itu visanya visa wisata Pak. Tapi *mijit* Pak, plus-plus lagi Pak. Ini pengawasannya dimana? Saya dulu Kapolres Jakarta Barat Pak, jadi wilayah saya di sana, saya hanya melihat-lihat saja Pak. Ini bagaimana pengawasan?

Nah sebetulnya kalau Bapak ada inovasi bekerjasama dengan Polri yang berada pada level desa dengan Kecamatan, ada bhabinkamtibmas kita atau ada babinsa kita yang TNI pada tingkat kecamatan ada Polsek Pak. Nah Dirjen-dirjen imigrasi enggak punya sampai ke desa Pak, tidak punya sampai. Bapak lihat sekarang ini yang bekerja-bekerja di daerah-daerah itu tenaga kerja asing ada di daerah itu, tidak terpantau sama sekali oleh migrasi. Saya kira itu Pak, terima kasih banyak.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Safaruddin dengan catatan Undang-Undang Imigrasi tidak sesuai dengan yang dibayangkan pada waktu perubahan Undang-Undang Imigrasi yang lalu. Yang lalu kita berharap dengan semuanya *full* diserahkan kepada imigrasi hal-hal yang berkaitan dengan institusi tidak ada saling benturan-benturan. Kita bikinlah semua ditangani oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Dirjen Imigrasi. Ternyata yang selalu digembor-gemborkan Tim Pora tong kosong nyaring bunyinya, di beberapa tempat itu kita temukan pada saat kita kunjungan ke daerah. Berarti catatan ini ke depan perlu ada amandemen tentang Undang-Undang Keimigrasian sesuai dengan kebutuhan, kalau memang ini jadi problem di lapangannya tentang kontrol pendatang. Ini catatan saja dari Pimpinan Komisi III.

Silakan Pak Menteri Hukum dan HAM.

**MENKUMHAM RI (PROF. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D):**

Terima kasih Pak Ketua.

Benar bahwa filosofi Lembaga Pemasyarakatan tidak pemenjaraan tetapi pemasyarakatan. Merehabilitasi, memasyarakatkan dan lain-lain itu tetapi Bapak Ibu sekalian di masyarakat filosofi ini masih sampai sekarang kalau kita mau lihat sukanya orang kan masih pembalasan dendam bukan pembinaan. Itu sebabnya nama-nama narapidana bukan disebut sebetulnya narapidana tetapi warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Fasilitas LP masih kurang pasti, kenapa? Tadi sudah saya jelaskan kemampuan kita untuk menampung dari besarnya jumlah yang masuk tidak sebanding. Net saja tiap tahun saja 20 ribu, net artinya yang keluar sudah dikurangi, yang masuk bersih 20 ribu. Dalam kondisi sekarang saja dalam kondisi yang lima tahun lalu saja sudah over kapasitas apalagi kondisi sekarang. Saya selalu mengatakan kalau kita gunakan membangun Lapas untuk 1000 orang saja satu Lapas untuk 1000 orang biayanya 150 miliar, belum personilnya. Berarti kalau satu tahun 20 ribu, berarti 15 triliun kalau kita mau untuk akomodasi, belum makannya. Lima belas triliun, padahal anggaran seluruh lapas kita satu tahun ini cuma 5 triliun. Jadi memang ya mau tidak mau kita menemukan suatu kondisi yang sudah melewati batas-batas kemanusiaan. Di beberapa lapas ada 700% ada yang, terutama perkotaan. Daerah-daerah sangat ketat narkoba itu sebetulnya saya tadi mengatakan kepada Bapak Ibu perlu reformasi dalam Undang-Undang Narkotika. Sebenarnya dalam Undang-Undang Narkotika kita kan mengenal pemakai itu di rehab. Tetapi inilah persoalan kita, ini buka-bukaan tapi ini yang sekali ini *off the record*. Kadang-kadang pemakai ditidak pemakaikan tergantung negosiasi. Inikan pada tingkat mulai dari penyidikan ke bawah. Kadang-kadang yang betul-betul kurir bisa di pemakaikan, tergantung komunikasi dan konsolidasi.

Nah ini fakta-fakta yang di lapangan makanya saya selalu mengatakan jangan Raffi Ahmad yang direhabilitasi, jangan si yang top-top saja direhabilitasi, di dalam itu banyak banget orang-orang yang sepantasnya direhabilitasi tetapi karena tidak punya kemampuan berkonsolidasi, berkomunikasi dan berkolaborasi akibatnya mengapa Undang-Undang Masyarakat seharusnya Undang-Undang Narkotika sudah kami masukkan beberapa tahun, 3 tahun yang lalu tapi mandek di perbedaan pendapat antara APH. Ini *off the record* teman-teman wartawan. Mandek di APH karena apa? Ya terus terang saja mandek di APH karena apa? Ada sesuatu yang harus. Nah kalau itu semua saya katakan kalau kita mau *reform* karena sangat aneh sebuah kejahatan mendominasi hampir seluruh jenis kejahatan. Biasanya pencurian yang paling banyak, biasanya perampokan digabung dengan pencurian, pemerkosaan, penipuan, penganiayaan itu, itu yang paling banyak. Tapi ini satu jenis *crime* yaitu kejahatan narkotika melebihi dari satu seluruh jenis *crime* yang lain. Ini suatu keanehan, aneh bin ajaib. Maka itu yang saya katakan Bapak Ibu sekalian saya minta nanti Komisi III kami sudah akan segera sudah masuk prioritas prolegnas 2020 agar Undang-Undang Narkotika ini langsung saja kita buat tegas, pemakai itu ini standarnya, kurir itu ini standarnya jangan dikasih abu-abu antara pasal berapa 127, 114. Jadi tergantung kita mau apakan, ke pasal berapa, dan ini semua diskresi yang membuat moral *hazard*, inilah yang membuat moral *hazard* itu.

Nah saya langsung ke kerusuhan, di kerusuhan ke Kabanjahe itu persoalannya Pak. Orangnya diambil dari dalam, dibawa keluar untuk didalami. Sangat sering ini juga ya, sangat sering terjadi orang diambil dari dalam dibawa keluar seharusnya menurut undang-undang diambil harus di kembalikan segera, ini bisa 1 bulan, 2 bulan diambil di oleh petugas, sesudah dikembalikan nanti ditangkap orang dari Lapas pengendalinya. Ini kan saya tidak mau *bersuudzon* tapi kita perlu apa namanya bekerjasama dan berkolaborasi menyelesaikan persoalan yang kronik ini.

Ini narkoba ini sudah betul-betul persoalan kebangsaan, persoalan yang tidak mudah di selesaikan karena sudah terlalu banyak *interest* dari banyak hal. Nah ini yang saya katakan, termasuk di tempat kami menjadi moral *hazard* kalau pengguna, kalau kurir, kalau bandar di tempatkan di satu tempat ya menjadi pasar narkoba. Permintaan dalam, kurir ada di dalam membuat moral *hazard* pegawai, data hukdis kalau yang dipecat sudah 200, yang kena hukuman berat 564. Lama-lama ini artinya yang kita hukdis hukuman berat itu 564, yang dipencet itu 560 hukum berat. 2015 ke 2019 yang dihukum berat 560, dan kebanyakan ini di Lapas dan yang di pecat baik yang dipecat dengan hormat maupun dipecat sesuai dengan hukuman yang ada itu dua ratusan, 200 ada.

Jadi memang persoalannya tidak mudah tapi kami tidak *give up* ya. Makanya ada program dari yang sempit kita pindahkan ke yang rendah tapi lama-lama yang dulunya itu siborong-borong masih longgar Pak. Sekarang karena dipindah terus dari Medan sudah padat. Sidikalang yang

lama-lama dulunya longgar pindah ke Sidikalang, padat lagi. Semua di luar Kota Medan yang dulunya longgar kita geser, kita geser, padat lagi.

Nah itu kejadian Lapas Kabanjahe isinya 130, kapasitas 130 diisi 400 sekian. Nah pada waktu orang itu diambil pulang memang dikasih hukum disiplin dan dua pegawai kami, kami pecat. Yang menyedihkannya bahwa itu adalah pegawai baru yang diterima tahun 2017 ya, langsung tergoda Pak, langsung tergoda dia. Di dalam ada pemakai yang tidak direhab, ada ketergantungan dari dalam, orang ini tidak direhab, sama dengan kita pecandu rokok tinggal dibuat lebih parah dari rokok, tidak di kasih rokoknya bagaimanapun berusaha untuk merokok. Ini tingkat kecanduannya melebihi berapa kali lipat dari perokok.

Waktu dia kembali dihukum disiplin karena tidak ada ruangan untuk *strap* sel, dia memprovokasi, dia memprovokasi ya memang sudah hukuman seumur hidup dia provokasi, enggak ada *nothing to lose* hukuman seumur hidup. Dia provokasi, ribut, nah nanti sesudah dia dihukum kembali dengan hukuman yang baru kami akan pindahkan ke Nusakambangan. Ada 20 orang provokator dan kami tandai beberapa orang yang di atas hukuman 7-8 tahun kami pindahkan ke Nusakambangan, dan pegawai yang terindikasi kami pecat. Dan sekarang sebagian mereka sudah digeser yang inkrah kita geser ke lapas-lapas di sekitar, yang tahanan sebagian di Polres dan sekarang sudah hampir bisa dimasukkan ya, sudah masuk ke Kabanjahe ke karena bloknnya tidak terbakar, pintar mereka Pak. Bukan bloknnya yang dibakar kantornya yang mereka bakar, tapi kalau bobol kita ambil mereka dari dalam, nah ini yang kita lakukan.

Yang berikutnya benar Pak fasilitas kebutuhan biologis namanya dalam konsep *conjugal visit*. Kalau di sini supaya lebih halus *family visit*. Tapi untuk mengatasi *over* kapasitas saja kita tidak punya ruangan apalagi mau menyediakan rumah *conjugal visit*. Itu bisa moral *hazard* juga Pak moral *hazard* siapa yang berhak dan berapa, siapa, iya kan. Di negara-negara lain sudah ada, kita belum mempunyai kemampuan itu. Kita belum selesai juga dengan persoalan-persoalan klasik kita, fasilitas dan prasarana yang bisa mengakomodasi. Idealnya begitu Pak menurut hukum, tapi kita belum mempunyai tempat untuk itu.

Yang berikutnya tentang AHU ini berkaitan dengan penentuan *beneficial owner* Pak. Kita ini mau menuju apa namanya karena kita anggota FATF ya dan menurut ketentuan internasional dari rekomendasi FATF seluruh badan hukum yang berkaitan yayasan dan lain-lain harus pengenalan tentang *beneficial owner* siapa yang penerima manfaat dari satu badan hukum itu harus jelas untuk tidak digunakan sebagai TPPU tempat pencucian uang, digunakan sebagai alat untuk transfer uang ke mana atau menerima uang kemana untuk tujuan TPPU baik pendanaan terorisme maupun penggunaan rekening atau *company* untuk penerimaan dana-dana dari yang ilegal, korupsi, narkoba dan lain-lain. Sebetulnya itu tujuannya apa yang disampaikan oleh, jadi pemilik koperasi wajib mencantumkan dilaporkan secara langsung, *offsite* dalam *online*, *offsite*,

*offline* dan data *online*. Ini dalam rangka rangkaian untuk mengenali prinsip bahwa pengenalan dalam prinsip *beneficial ownership*.

Kalau IT tentang pelayanan publik saya boleh menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM termasuk diantara dari seluruh Kementerian termasuk yang boleh kita katakan ya lumayan baik. Itu sebabnya pada waktu pembangunan OSS (*One Single Submission*) bahkan data badan hukum koperasi kita masukan ke AHU bukan ke Kementerian Koperasi karena sistem kita yang lebih siap. Pendaftaran badan hukum dapat dengan cepat diselesaikan dan tadi saya sudah tunjukkan misalnya terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari PNBP kita karena kita sudah membangun sistem *online*, baik di fidusia yang, fidusia adalah primadona kita yang sampai 700 miliar memperoleh PNBP per tahun karena sistem *online*, cepat ya, belum lagi badan hukum yang lain.

Demikian juga kekayaan intelektual setelah kita buat sistem *online* terjadi peningkatan sampai 700 miliar pendapatan PNBP dari yang sebelumnya 300 miliar 2014 yang lalu, terjadi lompatan yang sangat besar karena memang kita *invest* di sistem *online*. Beberapa tahun yang lalu saya mencanangkan Kementerian Hukum dan HAM yang kita katakan *e-government*, elektronik *government*, bahkan surat menyuratpun kita sudah sistem e-elektronik surat masuk keluar. Jadi tidak ada alasan bagi jajaran mengatakan surat tidak sampai karena secara elektronik dikirimkan kepada yang bersangkutan, dia disposisi buat *draft* langsung secara elektronik, dan pakai untuk keputusan-keputusan surat-surat penting pakai QR code yang tidak bisa di *copy* sama sekali. Jadi kita surat-surat apa kita sudah punya QR code, yang tentu surat-surat penting dan ini langsung ada QR codenya. Jadi di *scan* kita tahu ini suratnya benar karena langsung terdaftar secara *online* di tempat kita.

Jadi kami mencoba digitalisasi seluruh pelayanan publik di Kemenkumham ya, penguatan sumber daya manusia di bidang IT waktu penerimaan pegawai kami betul-betul mendorong anak-anak yang dari pengetahuan IT untuk kita rekrut, pengembangan *smart office* ya, integrasi pembangunan IT di Kemenkumham kita buat di Pusdatin ya, dan ada komite Pembentukan Komite Teknologi Informasi di kita untuk menjamin, walaupun ada beberapa nanti yang kita jelaskan ada soal-soal di beberapa tempat yang kami harus mengambil langkah reformatif nantinya.

Nah khusus itjen sedang dijajaki untuk mendapatkan sertifikasi ISO 3701, sistem anti penyuapan. Jadi ini adalah bagian dari yang mau kita buat di Kementerian Hukum dan HAM.

Pemantauan orang asing, benar Pak kita mempunyai Tim Pora tadi saya sudah sampaikan ada 3.684 Kecamatan. Kalau kita mau jujur, kadang-kadang hoaksnya lebih besar dari informasinya. Kita sudah katakan dimana-mana orang yang mengatakan ada pekerja asing yang tidak sesuai apa dilaporkan. Jadi dari 10.437 yang bebas kunjungan hanya 872 kasus ya. Tahun 2019 memang terjadi peningkatan menjadi 1339 kasus dan 8 di proju tahun 2018, 53 di proju 2019. Jadi memang ada

perbedaan yang mengawasi izin kerja sebetulnya adalah Kemenaker, kami mengawasi izin tinggal, imigrasi mengawasi izin tinggal ya. Jadi di Tim Pora itu ada imigrasi, ada Polisi, ada TNI, ada Pemda, ada Kemenaker, Kemlu dan lain-lain. Sebetulnya kalau ini diberdayakan ini sudah cukup. Di kecamatan sendiri kalau memang ditemukan orang-orang yang aneh-aneh tinggal di laporkan saja sebenarnya, apa ke Babinsa, apa ke polisi tentara itu, Kamtibmas atau yang lain-lain, ini bisa ya.

Baik, saya kira itu Pak Ketua ya, sudah saya jawab nanti kalau ada pengembangan kami jawab lagi. Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Menteri. Pak Safarudin jelas semua? Oh sudah jelas. Selanjutnya tengah kami persilakan PKB.

#### **F-PKB (LUQMAN HAKIM, S.Ag):**

Terima kasih pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Ketua Komisi yang saya hormati,  
Pimpinan rapat yang saya hormati, Anggota semua.  
Menteri Hukum dan jajarannya yang saya hormati.

Langsung saja atas izin Ketua Rapat, sebetulnya perbincangan mengenai over kapasitas Lapas ini kan sudah ya sudah seumur Republik ini lah kali ya, jadi bukan hanya ganti Dirjen, ganti Menteri, ganti Presiden, isu inikan terus, masalah ini kan terus terjadi. Nah sebetulnya kita berharap pada terobosan-terobosan yang bisa dipikirkan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk bisa melakukan lompatan penyelesaian ini seperti apa agar tidak agar *over capacity* lapas tidak terus menerus menjadi kenyataan yang seolah-olah kita tidak punya daya untuk menyelesaikan itu. Aneh rasanya kalau sebagai negara kita tidak punya daya untuk menyelesaikan masalah yang terus-menerus ada di hadapan kita. Saya tidak tahu apakah kalau dari sisi anggaran misalnya karena beban yang tadi disampaikan Pak menteri yang cukup sebesar 15 triliun lebih itu, mungkin tidak bisa *disupport* oleh APBN apakah ada kemungkinan diregulasi yang bisa dicari misalnya skema PPP atau apalah yang lain dengan pihak swasta. Tentu kalau swasta pasti akan ada hitung-hitungan keuntungannya, tapi menurut saya ini problem yang betul-betul serius harus dipikirkan, itu pertama.

Yang kedua, apa mengenai pengawasan orang asing. Saya setuju Pak Menteri *hoaksnya* mengenai orang asing yang disebut sebagai TKA ilegal itu memang lebih gede dari pada kenyataannya, *hoaksnya* itu. Dulu misalnya ada banjir 10 juta TKA dan sebagainya dan sebagainya, itu memang benar. Yang jadi masalah menurut saya adalah sinkronisasi apa yang dilakukan Kemnaker dengan Hukum dan HAM. Misalnya terakhir, saya dapat informasi imigrasi cukup mudah memberikan izin tinggal

sementara kepada orang asing, dimana celah ini dipakai untuk memasukkan orang-orang asing yang sebetulnya datang sebagai TKA sehingga dengan izin tinggal sementara itu mereka tidak perlu lagi merasa untuk mengurus perizinan ke Kemnaker.

Yang berikutnya, yang masih kaitannya dengan itu dengan orang asing, integrasi sistem antara Naker dan Kumham mungkin perlu disempurnakan lagi sehingga betul-betul bisa diketahui mana ini orang datang untuk bekerja dan mana orang datang non kerja itu sehingga jelas nanti data berapa sebenarnya TKA dan berapa orang asing yang datang yang sekedar untuk wisata dan lain sebagainya.

Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,

Saya mau menanyakan kalau ini pertanyaan, apa benar terjadi apa data, terjadi tidak apa, tidak ada data masuk mengenai 120.000 orang antara tanggal 9 Desember sampai 11 Januari itu? 120.000 orang asing yang katanya datanya tidak masuk ke server data pusatnya Kumham. Kalau itu betul semoga tidak terulang lagi karena kalau sampai ada perlintasan masuk, datanya tidak ada atau tidak *tercover* secara cepat, bukan saja soal tenaga kerja tetapi untuk keamanan nasional tentu bisa berbahaya. Kurang lebih itu saja Pak Menteri dan Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Silakan Pak Menteri.

**MENKUMHAM RI (PROF. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D):**

Baik *over* kapasitas, itu harus dengan peraturan perundang-undangan. Itu sebabnya di KUHP, di KUHP yang sekarang yang mau kita sahkan itu kita mengenalkan konsep *restorative justice*, jadi hukuman-hukuman ringan untuk apa *dimasukin* ke dalam, kita buat *restorative justice*. Jadi dengan konsep ini ketimbang mengirim orang ke dalam kita biayai lagi maka tipiring-tipiring yang dihukum ya kita kasih di luar dengan konsep *restorative justice*. Apakah hukuman penyapu jalan apa mau apa, mau apa ini kita kenalkan Pak.

Yang kedua tadi itu tadi karena narkoba memang harus ada perubahan Undang-Undang Narkotika. Bahwa ya pemakai memang harus kita *treat* sebagai penyakit. Waktu saya pergi ke Belanda saya mengunjungi lapas dan ada lapas-lapas yang kosong di sana. Itu berbicara tentang kejahatan narkoba, pertanyaan fundamental dari mereka adalah Anda mendekati persoalan ini dari perspektif kesehatan atau perspektif *crime*? Itu dua pendekatan yang berbeda. Kalau kita mendekatinya perspektif *crime* ya *masukin*, kalau kita mendekatinya perspektif kesehatan atau *health problem* maka orang ini yang pemakai memang harus di *treat* sebagai persoalan kesehatan.



Jadi ini saya kira memang di Undang-Undang Narkotika yang saya tahu Komisi III di sini dulu saya kira Pak Desmond ada di sini sudah memasukkan konsep itu hanya tanggung, diberi kesempatan memasukkan soal pemakai dan kurir itu dibuat sedemikian rupa menjadi diskresi yang berbahaya sekali. Jadi ini harus kita ke depannya ini harus kita terobos Pak. Kalau ini sudah ini sangat berkurang Pak kami yang terakhir ini juga dengan mengeluarkan percepatan reintegrasi sosial tadi 12.000 bisa kita kosongkan tapi masuknya juga *bejibun* tidak terasa sedikit berkurang tapi masih tetap kalau kita lihat dalam beberapa waktu yang lalu. Agustus lalu 165.000 sekian sekarang 169 lambat dia bertambah karena memang kita sudah mengenal konsep reintegrasi sosial dipercepat tapi tetap tidak mampu mengimbangi kecepatan-kecepatan masuknya tahanan-tahanan yang begitu besar, tahanan-tahan penyalahgunaan narkotika.

Yang berikutnya, iya *hoax* betul Pak, itu saya kalau kita melihat data-data orang asing yang bekerja di Indonesia ini tidak sampai 80 ribu Pak, itu sudah semua Pak. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang memperkerjakan di Abu Dhabi atau Dubai itu justru barangkali ekspatriatnya lebih banyak dari penduduknya. Malaysia, penduduk Indonesia yang bekerja, penduduk Malaysia itu 32 juta tapi orang Indonesia yang bekerja di sana hampir 4 juta, termasuk yang ilegal, termasuk yang ilegal. Ini memang demikianlah halnya, kita cuma sekitar 78 ribu hampir 80 ribu kamu.

Kami sudah punya sistem yang *terconnect* dengan Kemenaker sebetulnya. Jadi mulai dari luar kalau dia mau minta pekerja, Kemenaker kasih apa namanya RPTKA-nya langsung nanti petugas kita akan mengeluarkan izin visa kerjanya, visa izin tinggalnya. Jadi memang sudah, itu atas perintah Presiden pada waktu itu ya, akhirnya ada kerja sama antara sistem kita dengan sistem, hanya kadang-kadang di daerah-daerah ini jadi persoalan Disnaker-disnaker daerah yang di beberapa yang tidak, tidak langsung di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Jadi ini perlu memang ada suatu yang lebih baik lagi. Nah khusus saya ini karena supaya jangan ada dusta diantara kita, saya mau buat *timeline* mengenai Harun Masiku, walaupun ini sudah dipresentasi, tolong ditayangkan. Mana lembaran excel saya.

Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, sejak tahun 2016 saya sudah sistem Simkim kita itu sudah dibangun tahun 2018, sistem kita. Sewaktu saya jadi menteri saya sudah perintahkan tahun 2016 untuk membangun sistem keimigrasian yang mempunyai *state of the art*, karena tidak mampu lagi Simkim kita menampung data masuk karena apa, peningkatan jumlah orang yang mampu bepergian karena tingkat perekonomian masyarakat semakin baik dan umroh, maka peningkatan lalu lintas orang sistem yang ada membuat sejak tahun 2016 saya sudah memerintahkan ya tahun 2016 dimulai, sudah dibangun, dibangun, dibangun mulai bertahap. Bahkan tahun 2018 ada rapat-rapat yang saya meminta disposisi saya jelas ke imigrasi pastikan restrukturisasi Simkim berjalan sesuai rencana sesuai rencana dengan kualitas terbaik dan antisipasi kebutuhan pada masa-masa yang akan datang. Kita ada rapat itu 11 Mei 2018, bahkan sebelum

saya mengundurkan diri dari Menteri karena saya lihat sering *down* orang bertumpuk bahkan pengurusan paspor apa namanya sering mendapat komplain. Pengurusan paspor ya 30 September sampai ya pengurusan paspor sering diberitakan tertunda bisa 5 (lima) hari bisa lewat dari ini, antrian panjang. Karena sistem, transisi, integrasi sistem Simkim satu dengan yang baru kita bangun itu terus diperbaiki dan nampaknya *lelet*.

Saya tanggal 30 September sebelum saya lengser ke perabon, sebelum saya mengundurkan diri sebagai Menteri itu data ada, saya rapat kembali dengan khusus dengan imigrasi saya katakan, bagaimana perkembangan Simkim? Kok ini masih ada antrian kita masih terganggu, ini masih terganggu, saya katakan bagaimana saya pastikan sudah selesai akhir, katanya dipastikan selesai 2019. Ini saya minta pengarahan karena ini adalah sistem besar Pak, bukan sistem yang sangat kecil, menyangkut puluhan juta data dan dengan data biometrik, dengan data foto, dengan data jadi dia satu data orang itu besar karena ada biometrik, ada datanya. Jadi ada integrasi dari data Simkim satu itu setiap data itu akan diproses dan dibuat.

Kemudian sesudah saya dilantik kembali, 5 November saya rapat kembali, coba lihat. Iya, 5 November saya rapat kembali, 5 November. Ini yang sebelum-sebelumnya, saya minta kembali bahwa pastikan sistem ini berjalan dengan baik. Saya minta untuk dipastikan berjalan dengan baik ya. Saya cek ke atas sampai naik ke atas bagian Simkim, saya waktu itu mengatakan sampai memperkerjakan sampai 30, berapa puluh orang yang entry data? Mana ini, 60 orang untuk mengebut sistem itu supaya transisinya itu pengelolaan data untuk masuk ke Simkim dua supaya terintegrasi.

Nah khusus mengenai Harun Masiku Bapak Ibu sekalian, *timeline* ya. Ini jelas ya bahwa kita ini timnya di tim ini adalah tim independen. Saya tidak pernah mengundang mereka rapat sekalipun. Saya bentuk, saya tidak mau rapat, kalian kerjakan karena saya yakin betul memang ini adalah tidak benar. Dari BSSN dari Kemenkominfo, dari *cyber crime* Polri, saya minta dari Ombudsman mereka enggak mau, ya kalau enggak mau kita enggak bisa paksa mereka. Saya minta mereka meneliti sampai dalam karena itu berguna buat kami untuk melihat sebenarnya dimana persoalan barang ini.

Nah dari hasil penelitian Bapak Ibu sekalian ya, dari hasil penelitian terjadi ketidaksinkronan data pada aplikasi perlintasan keimigrasian dalam sistem informasi manajemen keimigrasian Dirjen Imigrasi di terminal 2F. Di terminal 3 itu tidak masalah karena sudah selesai. Jadi mereka berangkat tanggal 6 itu sudah terdeteksi di data di terminal 3, itu bisa langsung masuk ke server lokal, masuk ke Dirjen Imigrasi. Tetapi pada waktu tanggal Desember terjadi pelatihan-pelatihan staf-staf keimigrasian kita oleh *trainer-trainer* untuk *vendor* untuk perbaikan sistem di terminal 2F ya. *Upgrading* sistem di 2F, di terminal 3 sudah selesai dan kemudian ternyata memang data Harun Masiku itu diterima masuk tetapi di *counter* PC didata disini. Dari PC ke *server* lokal tidak *terconnect*. Dari server local sudah

masuk server lokal dia otomatis masuk ke server lokal itu adalah server yang dibandara yang gede langsung nanti masuk ke Puskim, tapi dia terekam di PC tidak hilang, disitu terekam semua lengkap, Harun Masiku benar. Setelah kejadian ini memang waktu saya perintahkan waktu mulai terjadi perbedaan, sebelum terjadi perbedaan, masyarakat menanyakan dimana posisi Harun Masiku apa namanya Humas Ditjen Imigrasi ya, Kabag Humas Imigrasi mengatakan itu belum saya, mengatakan masih di luar negeri karena dia melihat di pusat data Simkim, di pusat data Simkim. Kemudian dari situ saya minta Saudara Dirjen, saya bilang, Pak Dirjen mana tahu saya diperiksa wartawan coba kamu cek itu tanggal 18, tanggal 17 sebelumnya juga saya sudah minta, coba cek datanya, belum ada Pak belum masuk.

Nah oleh karena itu sesudah kejadian yang tersebut kami mulai meminta tim apa ini gabungan ini untuk bekerja dan ternyata ya, ternyata dari tanggal 23 Desember sampai 10 Januari ya terdapat 120.661 data terekam hanya di server masing-masing PC yang ada disana tidak terkoneksi ke server lokal ya. Setelah dilakukan perbaikan konfigurasi URL pada tanggal 10 Januari kedatangan Harun Masiku baru terkirim secara perlahan data itu secara lengkap tanggal 19 Januari pukul 22.06.29 WIB ya, karena diperlukan proses koreksi data ya.

Jadi waktu saya membuat *statement* dari informasi Dirjen Imigrasi saya katakan, Dirjen mana data karena tidak mungkin saya yang saya harus perintahkan Dirjen. Tentu Dirjen juga lihat langsung di sistem kita. Maka ada dua orang yang maka saya katakan siapa yang bertanggung jawab? Direktur TI-nya ya, direktur TI, dan karena Desember sendiri saya juga secara pribadi langsung melihat karena masih terus terjadi kendala. Bahkan ada surat tanggal 17, 29 dan 30 Desember dari Kantor Imigrasi Bandara ke Kantor Pusat mengatakan ada kendala, resmi suratnya, ada kendala mengenai kitas *online* di Bandara Soetta. Tanggal 17, 29 dan 30 Desember dikirim surat kejadiannya dan artinya sejak ini sudah dilihat memang kok ini sistem enggak jalan, nah ini kitas *online* kita menjadi ini ya. Dan Direktur Keimigrasian per tanggal 18, 30 itu melaporkan adanya kendala kitas *online*.

Jadi memang vendor yang melatih yang membuat *training* ini bertanggung jawab mengapa dia tidak meng~~connect~~ kembali sistem dari PC yang merecord itu langsung ~~disconnect~~ kembali ke server dan ke Jakarta. Pelaksanaan tugas apanya *fine-fine* saja tetapi ini sangat berbahaya sekali memang, saya setuju Pak. Dan saya sudah katakan rapat kemarin panggil vendor saya minta pertanggungjawaban mereka, kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan mereka ini sehingga data 120.000 ini tidak tiba pada saatnya di pusat data. Biasanya kita itu *online* Pak, bahkan pengurusan paspor, paspor tidak bisa terbit di Jakarta kalau tidak *online* karena semua sistem di Jakarta, ada di *backup* di Bali. Jadi kalau orang mau melihat misalnya Pak Ketua Herman Herry mau memperpanjang paspor langsung dari sistem, langsung dilihat di Puskim oh ini paspornya benar, tahun *sejini* benar, mau perpanjang benar, langsung. Makanya kita betul-betul *rely on* betul-betul sangat percaya pada

waktu itu tapi kendalanya pada waktu itu di sana. Ini betul-betul apes, apes besar dan sangat memalukan, buat pertama kalinya. Maka saya katakan kemarin sama Plh. Dirjen pastikan panggil mereka dan saya meminta pertanggungjawaban mereka membayar berapa ini barang sampai 120.000 terkendala. Dia enggak boleh, itu urusannya bisa dibayangkan Pak 120.661.

**KETUA RAPAT :**

Sebentar Pak, masalah Simkim ini kami juga Pimpinan Komisi memperdalam, nah untuk itu mungkin Pak Herman Herry bikin catatan khusus tentang Simkim yang hari ini kita lakukan pemantauan dan penelitian. Iya nanti Pak Benny bisa diperdalam ya. Silakan.

**F-PD (BENNY KABUR HARMAN, SH):**

Iya saya dalam Pimpinan.

**KETUA KOMISI III DPR RI/F-PDIP (HERMAN HERRY):**

Baik, terima kasih Pimpinan rapat.

Saudara Menteri dan jajarannya,

Apa yang tadi disampaikan oleh Saudara terkait dengan Simkim mungkin mendengar kisah dan ceritanya sebagai manusia kita bisa maklumi, kita paham ini soal *human error*. Tetapi kita bisa bayangkan dalam kepentingan negara sebesar ini dengan semua *possibility* kejadian bukan hanya soal Harun Masiku, soal teroris, soal kejahatan lainnya, imigrasi dan sistemnya Simkin itu menjadi pagar utama, pintu utama untuk mendeteksi semua kejadian. Coba Bapak-bapak bayangkan negara sebesar ini kok bisa terjadi semacam itu, satu itu.

Tentu saya paham bahwa menteri dan jajarannya bukan malaikat yang akan maha tahu semua, malaikat yang bisa tahu semua kejadian yang akan terjadi, tetapi saya menggarisbawahi kejadian ini, ini adalah suatu sistem perekrutan yang salah. Apa itu? Perekrutan vendor yang tidak profesional dan apa yang terjadi hari, ini jangan dianggap kejadian kebetulan, kecelakaan, musibah, tidak. Para pihak kalau perlu diberi sanksi pidana sehingga menjadi pembelajaran ke depan. Kenapa? Ini wajah negara. Akibat kesalahan yang hanya sepele yang saya anggap *human error* negara ini gaduh sehari-hari, berminggu-minggu dan kita semua menjadi malu. Bagaimanapun kitalah pihak-pihak yang menjadi penyelenggara negara ini.

Hal kedua ada kejadian yang sangat memalukan kemarin di bali, sistem *down*, sistem *down* tanpa ada *backup*, orang *stuck* sebegitu banyaknya di terminal internasional tanpa bisa masuk, bisa keluar. Ini pun salah satu kejadian yang sangat-sangat konyol. Sekali lagi saya tidak bisa salahkan siapa-siapa tetapi ini merupakan suatu pembelajaran bagi semua

pihak. Membangun Simkim untuk negara sebesar Indonesia ini tentu harus punya visi yang panjang jangan asal-asalan. Merekrut vendor, memang kita mengerti bahwa untuk mengerjakan memerlukan vendor yang profesional.

Saya minta Pak menteri untuk jatuhkan sanksi seberat-beratnya, termasuk sanksi pidana kalau memang memungkinkan. Kemudian membuat perencanaan ulang tentang Simkim untuk 10-15 tahun kedepan mengacu pada kejadian hari-hari ini. Saya mohon penjelasan dari pihak imigrasi apa yang membuat penyebab kejadian di Ngurah Rai kemarin? Saya kira itu dari saya. Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT :**

Pak Benny ini interupsi atau hak Partai? Interupsi berarti memperdalam apa yang ada. Silakan.

#### **F-PD (BENNY KABUR HARMAN, SH):**

Terima kasih Pak ketua yang mulia, sangat bijaksana.

Saya ingin mendalami soal bukan soal teknologi, teknologi itu alat mati, saya mau dalami soal manusianya. Penjelasan Bapak Menkumham tadi sangat masuk di akal, masuk akalanya bahwa alat itu yang salah. Masuk akal itu Pak Wayan, alat yang salah ya sudah, alat yang salah ya kita perbaiki. Tapi Pak Menkumham dan Ketua kesalahan alat ini membawa efek yang tidak menyenangkan, bikin kegaduhan yang luar biasa, meminjam kata Pak Ketua Komisi tadi, gaduh akibat alat yang salah ini. Mengapa alat yang salah ini bikin gaduh sebab dengan alat yang salah ini membuat mohon maaf Bapak Menkumham dituduh melakukan pembohongan publik. Termasuk saya juga menyatakan bahwa Pak Menkumham ini melakukan pembohongan publik. Mengapa? Soal Harun Masiku tadi. Bapak Menkumham mengatakan bahwa Pak Masiku ini masih ada di luar waktu itu kan? Padahal fakta investigasi yang dilakukan oleh Majalah Tempo pada tanggal yang disebutkan itu Pak Masiku ada juga di tempat kita dekat-dekat sini, kan begitu Pak. Saya yakin Pak Menkumham tahu juga soalnya ini tapi saya yakin juga Pak Menkumham sama juga dengan saya betapa sulitnya kita menyelesaikan masalah ini seperti apa kita selesaikannya. Tapi tidak salah juga menurut saya itu yang saya sampaikan Pak Menkumham tidak salah juga kita minta maaf kepada publik, kita salah, tembok di depan kita ini terlalu luar biasa tebalnya. Ini yang belum disampaikan oleh Pak Menkumham hingga saat ini. Pada tanggal itu Pak Masiku benar ada di sini atau tidak? Satu.

Yang kedua sahabat saya Pak Dirjen Imigrasi itu kalau salah alat kok dia dipecat itu bagaimana? kan begitu Pak. Saya menduga Pak Dirjen ini punya dua tuan Pak Ketua. Dugaan saya punya dua tuan. Siapa tuannya ini Pak ketua rapat saya mohon kalau mau didalami saya minta kita bentuk panja untuk mendalami soal Masiku ini. Sekaligus nanti kita mau uji Investigasi yang dilakukan oleh tim bayangan dalam "yang dibangun dibentuk oleh Menkumham" kita uji. Tim investigasi yang

dilakukan oleh Menkumham dengan panja yang kita bikin, kita uji. Sekalian menguji saya punya tesis saya punya data tentang keberadaan Masiku ini dan juga loyalitas gandanya Pak Masiku tadi, bukan Pak Masiku, Pak Dirjen tadi. Loyalitas ganda yang satu ke Pak Menkumham iya, tapi saya yakin yang kedua ini yang dia lebih loyal. Nah yang kedua ini saya tidak mau sampaikan dan saya yakin mungkin Pak Menkumham tahu juga. Supaya semua tidak ada spekulasi lagi kita semua tidak ada spekulasi mengenai keberadaan Masiku ini *kasihan* dia, *kasihan*.

Pada saat kita, Pak Dirjen, Plt saya sampaikan, akibat situasi ini saya bilang ada tiga spekulasi di tengah-tengah publik. Pak HM ini sudah ditembak mati, sangat mungkin. Yang kedua, saya bilang dia disembunyikan, disembunyikan oleh siapa kita dalam melalui panja saya usulkan. Yang ketiga adalah dia menyembunyikan diri di Pak Masinton tapi yang ketiga ini aku enggak yakin. Supaya tidak ada spekulasi sekali lagi saya mohon rapat ini kita rekomendasikan dibentuk panja supaya tuntas, tidak ada yang tidak baik saya dengan Pak Menkumham supaya tidak ada dusta di antara kita. Sebab saya lihat Pak Menkumham tadi saya lihat ini aduh sudah makin pucat aku lihat ini, beban berat sekali bagaimana menjelaskan soal Masiku ini. Enggak usah Pak, buka saja Pak Menkumham. Enggak usah disembunyi-sembunyikan, Republik yang paling utama itu yang penting.

Tadi Pak Ketua saya mohon, saya usulkan resmi kita bentuk panja supaya jelas Masiku ini apakah sudah di sana atau masih di sini. Memang bagi Masiku mungkin di sana senang di sini senang ya kan. Itu saja Pak Ketua. Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT :**

Silakan Pak Menteri ini ada dua dari Pak Herman sebagai catatan kami memang diskusi betul Pimpinan tentang persoalan ini, yang kedua dari Pak Benny tadi silakan.

#### **MENKUMHAM RI (PROF. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D):**

Baik saya sudah minta Pak Plh mengundang seluruh jajaran IT-nya Imigrasi lusa atau, dan mengundang dari konsultannya dari BSSN, ada orang ahli di sana yang juga telah membangun sistem BSSN.

Kalau soal ini Pak Benny ini jejak digital dengan mudah, Pakai kode-kode, coba tunjukkan dulu, dan tidak bisa dibohongi kalau jejak digitalnya jelas bahwa data-data yang ini, semua pakai itu diambil dan di *print* semua melalui sistem dan siapa saja dan kapan saja jejak digitalnya ini bisa di ketahui, dan apa yang betul-betul ini yang dikatakan oleh. Saya kira tidak saya tidak yakin saya tidak sangat tidak yakin bahwa Saudara Roni Sompi sengaja membohongi publik atau ada berapa tuannya atau tidak, ini konyol lah itu. Terlalu tolol lah saya kira kalau sampai begitu, dan kita apa namanya untuk seorang seperti itu saya kira intelektualitas dan integritas

kita tidak sampai harus dikorbankan dengan itu. Ini betul-betul data yang transisi sistem yang mengakibatkan terjadi.

Saya setuju Pak Ketua ini orang saya sudah berkali-kali bilang sama jajaran ini orang vendornya ini harus bertanggung jawab penuh. Enggak bisa *dibiarin*, satu *blacklist* satu lagi tanggung jawab perdata, kalau ada kemungkinan pidana harus tanggung jawab pidana enggak bisa sistem sudah begitu lamanya kita. Sewaktu karena sistem yang lama Simkim ada persoalan di kita dalam penggunaan IT sering *source code* dipegang oleh vendor. Sejak saya menjadi Menteri dan saya pastikan waktu transisi ini saya katakan kepada jajaran saya, saya tidak pernah mau yang *cawe-cawe* dengan apa yang penting apa *you deliver*. Saya mau sistem *state of the art*, saya mau *source code* bukan kita yang mengontrol, bukan vendor yang mengontrol kita tapi kita yang mengontrol vendor kebutuhan kita. Jadi *source code* harus ada pada kita ya. Itu arahan saya sangat jelas dan rekamannya itu.

Yang berikutnya sering terjadi didalam penggunaan-penggunaan IT vendor-vendor itu mendikte supaya *maintenance* terus, terus, terus karena IT kita kadang-kadang tidak paham. Sejak awal saya sudah wanti-wanti dalam soal itu, karena IT itu kalau enggak *maintenance* sistemnya itu kadang-kadang dibuat supaya lama, makin besar makin besar.

Jadi saya kemarin juga arahan saya kepada Direktur TI yang baru sangat jelas, Imigrasi adalah pintu gerbang kedaulatan negara. Pastikan disposisi saya sejak awal sangat jelas untuk pembangunan sistem Simkim dua ini. Nah saya kemanapun bisa pertanggungjawabkan soal ini ya, ini betul-betul bahwa ini adalah satu kesalahan dan memang Dirjen waktu memperoleh data itu sudah kita Kementerian Hukum dan HAM sudah menyatakan pernyataan maaf karena ada kesimpangsiuran data ini sejak data ini terbit tanggal 19 ya setelah 12 hari sesudah sistem masuk masa jeda sudah kita lakukan. Setelah *statement* saya, Dirjen Imigrasi besoknya juga menyampaikan setelah ditanya, menyampaikan hal yang sama, belum masuk, karena itu tadi dia percaya kepada seperti selama ini dia percaya kepada Simkim Pusat, data di pusat, sangat percaya itu.

**F-PD (BENNY KABUR HARMAN, SH):**

Pak Menteri boleh enggak, saya interupsi sedikit Pak ketua.  
Data Tempo itu dapat dari mana?

**MENKUMHAM RI (PROF. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D):**

Data apa?

**F-PD (BENNY KABUR HARMAN, SH):**

Majalah Tempo.

**MENKUMHAM RI (PROF. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D):**

Dari CCTV, bukan dari sistem.

**F-PD (BENNY KABUR HARMAN, SH):**

Oke, oke. Terlepas dari sisi CCTV dan sistem, apakah data Tempo itu betul atau tidak?

**MENKUMHAM RI (PROF. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D):**

Oh betul, CCTVnya Pak.

**F-PD (BENNY KABUR HARMAN, SH):**

Jadi pada saat itu memang Masiku sudah ada di sini?

**MENKUMHAM RI (PROF. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D):**

Sudah, benar.

**F-PD (BENNY KABUR HARMAN, SH):**

Oh jadi pernyataan Pak Menteri itu salah?

**MENKUMHAM RI (PROF. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D):**

Oh ya benar bahwa pernyataan saya itu benar bahwa karena di periksa di sistem kita belum karena di *stuck* di *PC counter* datanya.

**F-PD (BENNY KABUR HARMAN, SH):**

Iya mohon maaf jadi saya paham Pak Menteri. Jadi menurut alat saya percaya itulah pentingnya alat tadi. Sesuai dengan informasi di sistem itu dia belum masuk kan begitu Pak, ternyata

**MENKUMHAM RI (PROF. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D):**

Tidak, bukan. Sesuai dengan data di Simkin Pusat di *PC counter* yang hanya orang *PC* itu yang ada, jadi sama dengan ini Pak, masuk di sini ini tidak *terconnect* ke server.

**F-PD (BENNY KABUR HARMAN, SH):**

Saya mengerti, saya mengerti Pak. Ini memang butuh kecanggihan intelektualitas agak tinggi untuk memahami ini, kan begitu Pak.

**MENKUMHAM RI (PROF. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D):**

Saya kira sangat *simple*.



**F-PD (BENNY KABUR HARMAN, SH):**

Jadi Pak Menkumham tadi kan mengatakan bahwa informasi dan pengumuman kepada publik bahwa Masiku belum masuk itu kan dari alat tadi yang belum *diconnect*kan ke server tadi. Berarti Pak Menkumham *relay on* alat kan begitu Pak? Di sisi yang lain ada CCTV, iya kan? CCTV yang diperoleh Tempo bahwa sudah mengumumkan bahwa Masiku ini sudah masuk kan begitu Pak, Pak Menteri tidak salah hanya sumber alatnya alat informasinya Pak Menteri *relay on* alat tadi, sedangkan Tempo pada CCTV, itu saja bedanya. Enggak masalah.

**MENKUMHAM RI (PROF. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D):**

Jadi data yang CCTV ini ada di Angkasa Pura bukan di Imigrasi supaya jelas. Jadi data Angkasa Pura menunjukkan mereka *tracing* mungkin ke Angkasa Pura minta, pada hari Minggu bahkan Kementerian Hukum dan HAM melalui Kakan (kepala kantor) Imigrasi meminta meminta dokumen CCTV ke Angkasa Pura tidak diberikan dengan alasan libur kerja.

**F-PD (BENNY KABUR HARMAN, SH):**

Iya, jadi Pak kesimpulan saya Pak Menteri tidak salah, karena sumbernya adalah alat tadi, kan begitu Pak. Hanya ada alat lain di sana, kan begitu CCTV tadi, itulah sumbernya Tempo. Nah supaya ada pemahaman supaya saya juga jangan ada penilaian salah terhadap Pak Menteri bahwa Pak Menteri ini bohong ternyata tidak, sumbernya alat yang salah tadi. Tempo acuannya adalah CCTV makanya Pak Ketua saya usulkan kita panggil itu siapa tadi CCTV itu Angkasa Pura, kalau bisa kita panggil yang benar itu mana. Jangan sampai nanti masa Angkasa Pura sama Pak Dirjen ini beda kan begitu, Pak kan ini kan itu yang tadi saya bilang oh berarti ada dua tuan ini Dirjen Imigrasi ini, iya kan?

**KETUA RAPAT:**

Nggak-nggak begini Ben, sebenarnya jelas, wilayahnya yang berbeda. Ya wilayahnya berbeda, ya satu wilayah yang hari ini bisa didapatkan oleh Tempo lewat Angkasa Pura, pertanyaannya Angkasa Pura itu dasarnya *ngasih* Tempo itu apa? Ini yang harus kita lihat, begitu loh kalau kita mau perdalam.

**F-PD (BENNY KABUR HARMAN, SH):**

Makanya kita bikin panja Pak ketua.

**MENKUMHAM RI (PROF. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D):**

Kami resmi Pak meminta surat resmi, Kakan Imigrasi minta setelah berita Tempo dengan alasan libur. Saya kira ini data ini, *tracing* data ini melalui komputer sangat jelas Pak, kapan masuk ke apa, data *tracing* ini

bisa dilihat pakai digital. Kita melihatnya sama seperti orang mau kita cekal Pak, tidak perlu kami datang kemana kami cukup pada sistem kami.

**F-PD (BENNY KABUR HARMAN, SH):**

Pak Menteri,

**KETUA RAPAT :**

Sebentar, sebentar Ben saya *jembatanin*.

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU, SH):**

Pimpinan interupsi, interupsi.

**KETUA RAPAT :**

Kalau masih substansi yang sama akan saya izinkan, saya cuma mengklarifikasi. Mempertajam dan mengklarifikasi, sebentar ya agar enggak salah.

Pak Menteri berdasarkan data yang tidak lihat gambar ya, gambar itu ada di Angkasa Pura. Pertanyaannya apakah Majalah Tempo atau Tempo itu mendapatkannya pakai prosedur apa? Atau seperti pertanyaan Pak Benny ya, pihak Angkasa Pura yang mengasih dan membocorkan ini agar ada suasana jadi begini, kan ada ataunya. Begitu kan ya Pak?

**F-PD (BENNY KABUR HARMAN, SH):**

Sedikit, apakah tim investigasi yang dibentuk Menkumham sudah mendatangi Angkasa Pura atau belum?

**MENKUMHAM RI (PROF. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D):**

Sudah.

**F-PD (BENNY KABUR HARMAN, SH):**

Apa hasilnya? Kan begitu Pak. Harus dibuka juga, iya kan.

**KETUA RAPAT :**

Silakan Pak Menteri.

**MENKUMHAM RI (PROF. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D):**

Jadi jelas ya, mana tadi datanya.  
Untuk memastikan,

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU, SH):**

Pimpinan, pimpinan, ini biar enggak berkembang.

**KETUA RAPAT:**

Enggak-enggak, ini jawab dulu. Ini memang ada yang sudah harus kita jawab.

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU, SH):**

Biar ini tidak berkembang, ini kan dua system yang berbeda.

**KETUA RAPAT:**

Oke-oke, ini biar dijawab Pak Menteri dulu, sebentar dulu.

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU, SH):**

Tunggu-tunggu biar saya kelarkan.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar dulu ya.

**MENKUMHAM RI (PROF. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D):**

Jadi tim investigasi melihat ketidaksinkronan data ini pertama yang mereka lakukan melihat manifes penerbangan Batik Air, karena dia masuk Batik Air. Awalnya dia masuk Garuda dari terminal 3, terminal 3 tidak masalah sistem kami bisa menampung. Baru mereka ambil rekaman CCTV terminal 2 yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura II ya, baru masuk data log personal komputer konter imigrasi kedatangan terminal 2F bandara Soetta, baru masuk server lokal terminal 3 bandara Soetta, baru masuk server pusat data keimigrasian di Ditjen Imigrasi dan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait serta menganalisis bukti surat yang ada dan bukti digital yang ada. Nah dari sini mereka Pak.

Jadi mereka melihat di rekaman CCTV yang dikelola sama dengan yang dipunyai oleh Tempo. Kami tidak melihat data itu, bukan punya kami dan saya tentunya tidak, tidak, masih yakin dengan sistem kita pada waktu *statement* diberikan oleh Dirjen Imigrasi dan Kabag Humas setelah melihat sistem di pusat data imigrasi seperti yang sebiasa-biasanya dilakukan, dilihat ya belum masuk dan pada waktu itu rasa kita masuk akal, satu hari saja tanggal 7 tidak masuk, tanggal 8 OTT mungkin kita pikir wah bersembunyilah dia di sana. Mungkin itu kita pikir, tapi kita tidak melihat, tidak, setelah Tempo baru kita menyadari itu dan kita minta surat resmi pada waktu itu oleh terminal 3 oleh Kakanim ke terminal 3 minta dengan resmi surat oleh Kakanim tidak diberikan dengan alasan libur. Makanya kita heran kok Tempo bisa dapat, mungkin diambil pada waktu masa kerja,

saya enggak tahulah urusannya itu. Tetapi kemudian dengan data ini kita, saya bilang lagi kepada Dirjen, Dirjen coba cek IT coba cek, langsung mereka lihat *counter* wah ini ada kesalahan Pak. Disitulah Dirjen minta maaf kita katakan perintahkan dan memang kejadian itu terjadi. Dan untuk menjelaskan ini kepada publik kalau kami yang melakukan pasti dikatakan subjektif maka kita meminta eksternal secara resmi, tidak pernah saya campuri tidak pernah karena saya sangat yakin apa yang terjadi itu demikian halnya maka tim investigasi ini pakar-pakar IT baik *cybercrime* maupun Kemenkominfo maupun BSSN langsung, sebetulnya Ombudsman saya minta untuk ikut serta supaya menjaga objektivitas tim kita, tetapi Ombudsman tidak mau, saya tidak tahu alasannya apa terserah mereka saja ya. Seharusnya sesama lembaga negara untuk kepentingan bersama seharusnya Ombudsman menjaga netralitas, seharusnya mengirimkan orangnya supaya betul-betul *fair* begitu. Tapi ya tidak mau, tim ini bekerja tiga Pak dan saya mengatakan silakan buka sejelas-jelasnya, silakan teliti sejelas-jelasnya dan ini berguna untuk perbaikan kita.

Saya setuju apa yang dikatakan Pak Ketua, yang di Bali itu ada alat yang terbakar, rusak, *firewall* dan adaptor tetapi kemudian kita manualkan 3 jam sudah bisa jalan tapi kebetulan bersamaan dengan *downnya* sistem pada 10.30 pesawat-pesawat berbadan lebar pas kebetulan masuk. Itu Pak di *bypass* 3 jam kemudian 17 sudah sempurna, jadi selama rusak itu 3 jam terkendala kemudian di *bypass system*, tidak lagi manual di manualkan dulu manualkan dan ini tentunya berbahaya Pak manual, daftar cekal tidak kita ketahui tapi buat sementara kita demi kepentingan publik baru kemudian 17 semua sistem sudah *on*.

Baik, jadi saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Saya boleh pastikan Bapak Ibu sekalian bahwa ini saya kira saya tidak akan mempertaruhkan integritas saya untuk soal seorang Harun Masiku, terlalu kecil kalau saya menggadaikan integritas mungkin saya tidak sampai seperti ini, teman-teman di Komisi III tahu sejak dulu saya seperti apa pernah Pimpinan Badan Anggaran. Jadi dengan Pak Sudding ya waktu itu, jadi enggak lah terlalu apa itu.

#### **KETUA RAPAT :**

Iya terima kasih Pak Menteri kita tidak bicara yang lain ini kan Simkim saja. Pak Supriansa ini Simkim ya? Jangan bicara Harun Masiku kemana-mana saya akan potong. Bicara tentang Simkin lalu lintas ya, *border*.

#### **F-PG (SUPRIANSA, SH., MH):**

Siap Ketua.

Terima kasih Ketua, tadi memang saya interupsi. Saya itu menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Kementerian Kumham pada hari ini sangat serius dan membantu kita untuk mendalami benar-benar masalah ini. Tetapi yang ingin saya katakan Pak Ketua bahwa rasa-rasanya Bapak Menteri Hukum dan HAM ini tidak terlalu serius marah

terhadap peristiwa lambatnya sampai data itu di pusat karena peristiwa ini terjadi Januari, kalau memang Kementerian Hukum dan HAM merasa dirugikan maka pada saat itu maka sudah bisa Kementerian Hukum melaporkan pidana vendor atau pihak-pihak yang merugikan keberadaan Kementerian Kumham. Nyatanya sampai hari ini Kementerian belum melaporkan secara pidana, itulah salah satu yang saya anggap bahwa kemarahan Pak Menteri tidak terlalu serius marahnya sebenarnya.

Yang kedua, saya ingin membandingkan Pak Menteri antara kemampuan server yang ada pada Bapak ini dengan *Traveloka* atau atau *tiket.com* atau *grab* atau apa itu. Saya membayangkan negara yang besar dalam Kementerian ini mengelola uang kurang lebih 13,8 triliun per tahun bisa dikalahkan oleh kemampuan servernya oleh *Traveloka*, tadi pagi saya mau berangkat ke bandara saya beli tiket hampir berapa miliar orang menggunakan *Traveloka* ini tapi tidak pernah dia mengeluh bahwa uang saya, saya sudah belanjakan tetapi tidak ada tiketnya. Kenapa bisa kalah negara yang besar sama *Traveloka*? Atau saya harus mengatakan bahwa Kementerian Kumham ini pergi belajar sama *Traveloka* atau di *Grab* untuk mengantisipasi ini? Ini menjadi tertawaan kita, sungguh-sungguh Pak Menteri Bapak menjelaskan tadi ini kalau kita bisa *polling* karena penonton di luar ini, ini di *live* ini pasti beberapa masyarakat sependapat dengan kata-kata saya bahwa ini hanyalah lelucon belaka. Serius Pak Menteri menjelaskan tetapi masyarakatnya mengatakan “ah tidak seperti itu masa negara kalah sama *grab*, masa negara kalah sama sistem yang ada di *Traveloka* tadi”, itu Pak Menteri.

Tentang permintaan maaf lagi. Permintaan seorang pejabat negara yang dipundaknya adalah negara meminta maaf itu bukan solusi, itu adalah mempermalukan negara sebenarnya. Saya serius ini mengatakan bahwa kita ini seperti dipandang oleh masyarakat, kita ini bermain-main dalam bernegara, bermain-main dalam mengelola negara. Sedikit ada masalah maafkan wahai rakyat seperti ini kesalahan kami, tidak seperti itu mengelola negara, enggak boleh. Harus serius mengelola negara ini. Di sisi lain saya memberikan contoh bagaimana Dirjen-dirjen Bapak ini pergi kita mengunjungi Lapas saya memuji, Ibu Tami menerima kita naik motor hujan-hujan kita naik bus, itu namanya pejabat negara yang serius mengelola. Mana pejabatnya-pejabatnya Bapak ini turun enggak ke sana? Dikambinghitamkan lagi itu Angkasa Pura *naudzubillah min dzalik* jangan seperti itu. Kalau kesalahan-kesalahannya memang dari kita salah dan ingin memperbaiki, kita dirugikan lapor pidana itu baru serius.

Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada, atau saya lanjutkan dengan hak saya? Fraksi. Ini interupsi dulu ya, oke terima kasih banyak Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, silakan Pak Menteri.

**MENKUMHAM RI (PROF. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D):**

Baik, *Traveloka* itu sistem bisnis Pak aplikasi jangan disamakan dengan *security* negara beda.

**F-PG (SUPRIANSA, SH., MH):**

Maaf Pak Ketua.

**KETUA RAPAT :**

Tunggu, tunggu, tunggu.

**MENKUMHAM RI (PROF. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D):**

Jadi mengapa lama-lama kita buat, kalau kita langsung ini sebelum ada hasil independen enggak mungkin Pak, kan harus ada hasil independen dulu Pak, hasil dari tim yang benar yang objektif. Setelah kita temukan memang ada salahnya di situ. Kalau tadi salahnya *pure* anggota saya itu lain ceritanya. Tapi ini karena ada kesalahan di vendor baru setelah hasil independen, kan enggak boleh *jumping into conclusion* baik satu hari itu langsung kita gas pidana, enggak bisa begitu. Kita harus mempunyai langkah-langkah yang *strategik* supaya tidak gagal, supaya tidak sembarangan, datanya harus benar begitu. Jadi itu yang mau saya sampaikan, silakan Pak Ketua.

**KETUA RAPAT :**

Ada masalah tentang *statement* Beliau?

**F-PG (SUPRIANSA, SH., MH):**

Masih tersisa di benak saya ini.

**KETUA RAPAT :**

Apa itu?

**F-PG (SUPRIANSA, SH., MH):**

Sepertinya Pak Menteri ini tidak ingin dibandingkan dengan *Traveloka* bukan persoalan bisnisnya, kemampuan dia dengan apa yang kita lakukan, *enter* di *handphone* kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Masa Bapak harus turun Pak saya mengakui Bapak menciptakan kemarin di AHU perseroan terbatas kita membuat dalam tempo 10 menit itu sudah bisa keluar SK nya. Itu top, maksud saya ini yang harus dicontoh. Kenapa ada kesalahan di sana tidak bisa langsung *online real time* sampai di pusat, ini menjadi pertanyaan bukan persoalan ini bisnis ini tidak bisnis. Ini adalah bagaimana caranya bisa *real time* itu informasi yang diterima oleh server itu, itu saya maksudkan sebagaimana Bapak kemarin menciptakan AHU itu yang

perseroan terbatas itu 10 menit bisa selesai. Selesai ada SK nya, itu yang saya bandingkan begitu. Terima kekalahan itu bahwa kita kalah.

**KETUA RAPAT :**

Cukup, cukup, kita tidak mencari kesalahan tapi ini semua catatan-catatan untuk membangun mitra ya, memperbaiki. Oke Bapak Ibu sekalian sekarang jam lima kurang lima, kesepakatan kita jam lima, saran saya sebagai Pimpinan kita akan lanjut malam ini atau besok? Besok, jam? Jam 11? Oke. Pak Menteri usulan besok jam 11.00 kita lanjut.

**MENKUMHAM RI (PROF. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D):**

Karena ini besok ada siapa?

**KETUA RAPAT:**

Kalau malam bisa enggak selesai Pak karena terbatas juga, ini baru ada dua Pak, baru dua Fraksi.

**MENKUMHAM RI (PROF. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D):**

Besok jam 11 ya? Jam 11 bisa, bisa.

**KETUA RAPAT :**

Bapak Ibu sekalian, kita tunda besok jam 11.00 akan kita lanjutkan. Demikian rapat hari ini cukup sampai sekian.

*Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.47 WIB)

Jakarta, 24 Februari 2020  
a.n Ketua Rapat  
SEKRETARIS RAPAT,

**NOVIANTI, S.E.**  
**NIP.19671104 198803 2 001**